



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA (VIRTUAL)
KOMISI XI DPR RI DENGAN OTORISASI JASA KEUANGAN**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, Tanggal	: Selasa, 7 April 2020
Pukul	: 13.05 s.d. 17.50 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono Kabag Sekretariat Komisi XI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Update Kondisi Industri Jasa Keuangan di
Hadir	: Tengah Wabah Covid-19 KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DITO GANINDUTO/KETUA KOMISI XI/F-PG):

Peserta rapat dapat mengikuti rapat di tempat tertutup atau di tempat yang tidak bising tidak ramai, peserta rapat tidak berbicara terlebih dahulu sebelum dipersilahkan oleh pimpinan dan pimpinan rapat akan menanyakan dan memberikan hak untuk instruksi dan memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi.

Pembicaraan dilakukan berdasarkan fraksi dan ditunjuk diatur oleh kapoksi dan berbicara paling lama 5 menit. Apabila ada peserta rapat sedang berbicara peserta rapat yang lain dapat mematikan audionya, rapat secara virtual diakhiri dengan kesimpulan yang dibacakan oleh pimpinan rapat.

Jadi kami mohon pengertian kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI bahwa sebelah dewan ketua dewan komisioner OJK Pak wimboh memberikan paparannya kita semua tidak ada interupsi setelah itu pertanyaan diberikan kepada ada putaran pertama kepada para Kapoksi untuk dapat menunjuk anggota Fraksi yang akan mengajukan pertanyaan sebaiknya yang kemarin sudah diganti dengan yang lain dan jangan terlalu lama karena sekarang pspb sudah diberlakukan di Jakarta sementara saudara-saudara kita sekretariat Komisi XI DPR RI masih bekerja dari kantor sekretariat DPR RI, karena kita semua berada di rumah masing-masing tetapi saudara-saudara kita ada di sekretariat jadi Kami menyarankan tidak lebih dari magrib harus sudah selesai karena mereka harus memikirkan transportasi kembali ke rumah masing-masing sehubungan dengan situasi covid 19 saat ini, oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami persilahkan kepada Pak Wimboh yang telah kemarin memberikan pemaparannya secara detail apabila sekarang mungkin untuk refresh kita semua cukup secara garis besar saja setelah itu kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kepada seluruh anggota Komisi XI DPR RI untuk melakukan pendalaman.

Hadirin yang kami hormati.

Agenda rapat kerja hari ini adalah melanjutkan pendalaman Raker pada tanggal Senin 6 April 2020 kemarin, pada rapat kerja melalui video conference kemarin komisi 11 dpr-ri ingin mendengarkan penjelasan dari dewan komisioner OJK secara mendalam terhadap perkembangan kondisi perekonomian nasional setelah wabah covid 2019 tersebut, Selanjutnya kami persilahkan kepada saudara ketua OJK untuk menjelaskan kembali kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan waktu kami persilahkan.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Terima kasih Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Dan juga Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastiastu Namu buddhaya

Salam kebajikan Shalom.

Pertama-tama kami Panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat-nya dan karunia-nya kita bisa bersama-sama untuk hadir pada rapat melalui video conference pada siang hari ini, atas nama seluruh Anggota Dewan komisioner. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya dan kami tentunya kami ini ditemani lengkap oleh anggota dewan komisioner dan tentunya kami dengan rapat ini kami nanti mengharapkan beberapa arahan dan beberapa pendapat pandangan bagaimana nanti kita dalam menghadapi covid 19 ini, sehingga masyarakat dan ekonomi kita akan bisa kita kendalikan dengan dampak yang minimal.

Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan.

Menyambung yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa virus Corona ini Telah mengancam seluruh dunia jadi berbeda dengan krisis sebelum-sebelumnya dan ini sebagaimana kami sampaikan kemarin ini yang kena langsung di sektor riil jadi kehidupan manusia dan kita juga bagaimana ekonomi kita dan sektor keuangan kita ini bisa pulih ini tergantung Bagaimana Corona ini bisa selesai. Jadi kita sudah ujungnya kapan juga kita tidak tahu tetapi berbagai prediksi ini masih memakan waktu cukup lama dan tentunya kita harapkan dengan upaya-upaya serius semua negara ini tentunya akan berusaha supaya ini lebih cepat.

Jadi ekonomi ini kapan bisa recover sektor usaha kapan bisa recover ini sangat tergantung kecepatan kita menyelesaikan wabah virus Corona ini sehingga bisa memberikan keleluasaan orang untuk bisa berupaya lagi untuk berusaha lagi, ini adalah garis yang sangat penting yang harus kita pakai bersama.

Namun kita di samping Bagaimana menangani korona tentunya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh OJK termasuk Bank Indonesia ini adalah bagaimana kita bisa handle berbagai permasalahan yang sudah muncul dalam ekonomi dan sektor keuangan ini, secara garis besar kami sampaikan bahwa sentimen negatif di pasar keuangan pasar modal dan juga nilai tukar sudah terjadi Di seluruh dunia, seluruh juga tidak bisa menahan ini dan yang dilakukan bagaimana kita ini hanya memberikan sentimen positif melalui apa apa yang kita lakukan di kebijakan pemerintah dan juga kebijakan sektor keuangan agar Para investor mempunyai keyakinan bahwa tekanan ini ini di masing-masing negara ini bisa cepat selesai ini yang kita lakukan di antaranya kemarin ada beberapa hal nanti akan kami sampaikan dan juga sentimen negatif ini ini sekarang betul-betul hanya mempunyai persepsi bahwa ekonomi dan sektor usaha kena sehingga Para investor preventif menjual sahamnya.

Bagaimana ini bisa berbalik tergantung bagaimana kita menangani virus Corona dan bagaimana kita bisa menahan sektor riil dan tentunya sektor keuangan, Apa yang dilakukan dalam sektor pemerintah melalui kementerian keuangan dan seluruh sektor Kementerian melakukan upaya agar sektor riil ini Bisa

service bisa disanggah dengan berbagai hal diantaranya kemarin sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan berbagai insentif sudah diberikan dan tentunya insentif ini kita harapkan bisa memberikan nafas lebih panjang bagi sektor riil sampai menunggu dengan korona ini bisa selesai, terutama adalah sektor sektor UMKM yang kemarin dilakukan dengan berbagai upaya Bansos dan bantuan bantuan lainnya termasuk stimulus pajak termasuk berbagai kemudahan dari berbagai sektor yang dilakukan agar sektor riil ini bisa bertahan dan bisa bernafas sampai korona ini selesai, Dan juga Bank Indonesia telah melakukan kebijakan memberikan ruang yang lebih luas pada sektor keuangan dengan penurunan BWF itu ada hampir 60 triliun itu disediakan dengan penurunan bwr sehingga sektor perbankan mempunyai ruang yang cukup apabila harus melakukan berbagai exsen terutama ini menang kau adanya ketidakpercayaan masyarakat terutama pembelian dolar yang kelihatannya oleh Bank Indonesia juga semakin lama tentunya kekuatan Bank Indonesia juga ada batasnya nya.

Sehingga nanti jangan sampai likuiditas di sektor keuangan terganggu Bank Indonesia memberikan stimulus itu, dan juga bahkan beberapa stimulus juga dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia. OJK yang kemarin kita lakukan bahwa pertama ini kita di pasar modal memberikan sedikit secara gradual agar penurunan tidak terlalu dalam diantaranya kemarin kita sudah lakukan membolehkan emiten melakukan buyback, buyback ini adalah tanpa melalui RPS yang pada kondisi normal tidak diperkenankan dan buyback ini akan dilakukan agar saham-saham itu tidak bisa diperdagangkan apalagi untuk melakukan spekulasi, jadi semua emiten sudah mengajukan kepada pasar modal ada 33 emiten yang melakukan backpack dan juga kita melalui pasar modal telah melarang short selling.

Kemarin sudah kami sampaikan tidak boleh spekulasi short selling tiap menjual barang di pagi hari dimana tidak punya barang-barangnya mungkin di sore hari pada saat harga turun ini dilarang Disamping itu ada auto rejection di mana Kalau saham sudah turunnya di atas 5% itu kita stop, selama 30 menit agar tidak turun lebih dalam sehingga kalau kita lihat historisnya penurunan ini tidak akan lebih dari 5% pada saat 1 hari tertentu.

Ini semua tentunya kita masih mempunyai beberapa instrumen yang kita lakukan namun demikian kita tidak perlu dipakai termasuk mungkin pengetatan mengenai Auto rejection ini dengan 5% ini kemarin kita sudah cukup bagus dan bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini saham sudah mulai frekuensinya hijau sudah lebih sering daripada merahnya dan sudah mulai sedikit..., dan tentunya pasar saham ini sangat penting karena dalam catatannya bahwa saham ini sudah turun 23,6 persen, cukup ini dalam sejarah yang paling dalam penurunan di Indonesia dan juga investor dan non residen sudah melakukan penjualan 11,3 triliun di pasar SBN juga sama tadi sudah saya sampaikan bahwa penjualan oleh... 129,2 t dan juga nilai tukar sudah otomatis memberikan tekanan kepada nilai tukar nah.

Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,

Ini adalah di pasar modal yang di pasar modal dengan harapan bahwa sentimen positif muncul sehingga nanti investor-investor bisa balik lagi harapannya hanya itu di pasar modal dan berikutnya bagaimana kita memberikan ruang yang lebih luas kepada sektor keuangan kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa perbankan dan lembaga keuangan kita berikan kesempatan melakukan restrukturisasi artinya

restrukturisasi ini memberikan insentif bagi lembaga keuangan dan bank agar tidak perlu membuat pencadangan karena pencadangan itu akan mengeluarkan modal dan apabila itu terlalu besar maka permodalan bank akan di bawah press hold dan akhirnya menjadi bank dalam pengawasan intensif atau dalam lembaga keuangan mungkin harus dilakukan surat teguran dan akhirnya harus ada setoran modal apabila nggak ada tentunya ini akan menjadi berlarut-larut.

Nah untuk itu kemarin OJK sudah memberikan insentif kepada bank dan lembaga Keuangan untuk merestruktur dan kategori langsung lancar. Restrukturisasi ini buat semua level (Rekaman tidak jelas) akan untuk sektor informal dan juga untuk KUR secara khusus pemerintah melalui kebijakan stimulus pemerintah akan membantu dengan menggunakan APBN untuk membantu agar sektor itu betul betul tidak berdampak di sektor keuangan kami minta direstruktur sehingga diberi keleluasaan untuk memperpanjang kreditnya bahkan untuk memberi haircut kalau diperlukan tapi kita batasi paling lama 1 tahun, dan bank yang mempunyai uang atau likuiditas tetap kita minta untuk bisa membayar karena apa, karena (Rekaman tidak jelas) masyarakat-masyarakat kecil yang betul betul bekerja hanya untuk makan apakah ini terimbas oleh covid ini sehingga mereka tidak bisa makan.

Sehingga ruang ruang bisa lebih diberikan itu bagi debitur ya, yang mempunyai uang untuk membayar sektor perbankan dan sektor keuangan dengan diberikan insentif hanya membayar ketepatannya membayar sudah bisa dikategorikan lancar. Dalam kondisi normal tidak bisa karena kriteria yang harus dipenuhi yaitu prospek dan kondisi debitur, nah ini prospek dan ini kondisi debitur bisa dihilangkan dan tentunya ini ada debitur debitur ini adalah debitur debitur yang kita prioritaskan adalah yang sampai dengan 10 miliar.

Bahkan kalau sudah di atas 10 miliar kami perkirakan itu memang terestruktur karena untuk membayar biarpun barangkali berat tapi kalau debitur debitur di bawah itu menurut hemat kami masih ada ruang bagi debitur debitur yang mempunyai tabungan atau mempunyai perusahaan induknya kuat ini hanya sekedar kekuatan membayar, ini kita harapkan akan memberikan ruang bagi bank dan lembaga keuangan untuk bisa bernapas berkaitan dengan permodalannya. Namun demikian ini penundaan atau perpanjangan waktu pengurangan pokok dan sebagainya pasti ini mengganggu pasti mengganggu likuiditas bagi perbankan maupun lembaga keuangan, untuk itu kami **Monitor porsley** melalui pengawas Kondisi Individual sehingga kami minta seluruh lembaga keuangan melaporkan kepada OJK (rekaman tidak jelas) dan juga nanti ada lembaga keuangan ataupun perbankan yang memang karena spare likuiditasnya sangat tipis kalau ada hal-hal yang perlu (rekaman tidak jelas) akan dibicarakan dan tentunya kalau perbankan bisa menggunakan interbank call money kalau itu lembaga keuangan bank bisa meminjam kepada (rekaman tidak jelas) pinjaman likuiditas melalui Lender of the last Resort Bank Indonesia setelah interval bank money nggak dapat inilah nanti Bank Indonesia yang akan memberikan pinjaman (rekaman tidak jelas) ini monitoring porsley akan kita lakukan dan tentunya konsultasi perkembangannya dengan komisi XI.

Bapak Pimpinan Bapak Ibu sekalian.

Ini semua tentunya di lapangan kami sudah dapat komitmen seluruh BLU baik bank maupun keuangan non bank, komitmen ini bahwa mereka memilih

melakukan program restructuring bagi nasabah nasabah yang memang tadi ada kesulitan keuangannya Karena Dampak korona.

Namun demikian ini harus komunikasi harus dilakukan karena ini mencakup seluruh... (suara tidak jelas)...di wilayah Indonesia, sudah tentunya ini harus mengeluarkan statemen itu dan ini hampir semua perbankan sudah mengeluarkan dan lembaga keuangan dan ini bahkan kita punya catatandi Bank BRI itu sudah ada 134.250 debitur (rekaman tidak jelas) dan juga BNI sudah melakukan BTN sudah melakukan, Mandiri sudah melakukan, jadi ada 56 bank konvensional telah melakukan ya artinya, ada mungkin telah melakukan namun belum kita dapat informasinya.

Tetapi prinsipnya seluruh CEO ikut program ini karena ketidak konsekuensinya akan diberikan nasabahnya karena tidak lancar dan membentuk PPAP, dan ini kami memonitor dengan rutin dan yang terjadi di lapangan sehingga supaya masyarakat paham dan kita sudah memberikan himbauan pertama masyarakat tidak berduyun-duyun ke lembaga keuangan Bang cukup menggunakan secara online diupayakan dan tentunya kalau perusahaan Besar tentu dengan online tapi kalau yang kecil-kecil itu sudah disediakan platform dengan menggunakan online, dan juga bahwa setiap Nasabah (tidak jelas) dan ini silakan perbankan lembaga keuangan berdiskusi dengan nasabah skema mana yang akan dipilih.

Juga untuk perusahaan listing sama yang di lakukan hal yang sama dengan (yang rekaman tidak jelas/ suara hilang) Mungkin sektor informal atau koperasi ini yang kadang-kadang ada distorsi distorsi di lapangan Namun demikian sudah kami lakukan bahwa kita duduk bersama memberi pinjaman atau penyewaan dan nanti ini kita carikan solusinya.

Jadi intinya sementara Penarikan kendaraan (rekaman tidak jelas) Ini Pinjamnya bukan kepada lembaga keuangan Kita yakin nanti Hal-hal begini nanti kami akan tekel bersama supaya tidak terjadi distorsi di lapangan.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian.

Untuk di IKNP dan dengan perbankan secara prinsip kita treatmentnya sama (rekaman tidak jelas/suara tidak terdengar)Lembaga keuangan dan perbankan untuk itu kami bersama-sama pemerintah dan Bank Indonesia dan LPS ini preventive melihat kembali apa (suara tidak terdengar). Ini hanya untuk jaga-jaga tidak mesti harus kita lakukan tentunya upaya-upaya maket Solution harus kita lakukan dan juga dengan apabila itu tidak bisa baru protokol berikutnya Ya apa boleh buat harus kita lakukan ini hanya untuk jaga-jaga Apabila terjadi Masif Kalau hanya satu dua dan itu tidak menimbulkan sentimen negatif kepada Sektor keuangan tentunya nya ini (suara tidak terdengar) Perpu ini hanya untuk berjaga-jaga.

Bapak Ibu sekalian.

Ini adalah Perpu ini diantaranya nya memberikan ruang kemarin ya pemerintah untuk bisa mengeluarkan lebih banyak. (suara tidak terdengar) membuat peraturan pemerintah dengan Anda lanjutin dengan POJK tentang bagaimana Merger yang lebih awal dan juga tentunya Bank Indonesia dengan LPS kita akan memperbaiki berbagai MoU yang selama ini sudah ada namun demikian ... dengan kondisi terakhir agar kalauterjadi apa apa itu bisa kita apa eksekusi dengan (suara tidak terdengar) kami sampaikan mengenai bagaimana kaitannya

dengan covid ini yaitu mengenai anggaran sekalian kami sampaikan bahwa realisasi anggaran sampai Maret 2020, kami telah diberikan, OJK telah diberikan Pagu anggaran sebesar 6,06triliun sampai dengan Maret 2020 secara keseluruhan dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar (suara tidak terdengar) realisasi anggaran Operasional dan pendukung lainnya yaitu masing-masing operasional 29,2% (suara tidak terdengar) Dan pendukung lainnya 29,3. Ini hampir sekitar 1 per 3.

Sedangkan untuk kegiatan pengadaan aset belum banyak masih kecil yaitu (suara tidak terdengar).

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami muliakan.

Itu garis besar ya dan Besar harapan kami Stimulus yang kami lakukan ini bisa Memperkecil dampak kepada sektor riil dan sektor keuangan sehingga kami tidak harus melakukan eksekusi berbagai skema yang ada Di Perpu itu ya dan tentunya Besar harapan kami dukungan Bapak Ibu sekalian dan arahan apabila harga hal-hal yang nanti kami lakukan demikian terima kasih, *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami kami sampaikan kepada dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ibnu Santoso, telah memberikan Paparannya rapat hari ini sebagaimana Sebagaimana telah kita Sepakati bersama pendalaman kita lakukan perfeksi untuk ini kami minta kapoksi nya menunjuk yang akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendalaman(suara tidak terdengar).

Baik pertama kami berikan kesempatan kepada praktik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami persilahkan.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P.):

Iya Pak Pak kami menugaskan Pak Andre.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Yang terhormat ketua Dewan Komisiner OJK bersama jajarannya.

Yang pertama adalah kami ingin dari jawaban yang ada tertulis itu masih mengandalkan berdasarkan data historis ada Pengaruh pandemic covid 19 pada sektor keuangan itu Telah dijelaskan di dalam presentasi Oleh yang terhormat pak ketua kinerja kemampuan sektor riil kemudian perubahan nilai aset lembaga jasa keuangan dan interkoneksi antar sektor keuangan (suara tidak terdengar) karena kita ingin melihat sebetulnya antisipasi terhadap potensi risiko ke depan atau *forward looking* Kita sudah mempunyai sekenario skenario dan sangat, contohnya di industri pembiayaan itu dengan tidak adanya pembayaran di dalam industri Pembiayaan.

(suara tidak terdengar) dan ini menurut saya bukan hanya di sektor UMKM karena itu kami menginginkan untuk apakah OJK telah melakukan *stres tes*

terhadap hal ini terhadap pikiran saat ini dan Dan kalau memang dikatakan rahasia khusus untuk komisi XI untuk bisa diberikan tanda kalau itu sangat penting, karena pemerintah sudah punya skenario dengan pertumbuhan 2,3% sangat berat -0,4, tentu ini dengan catatan bahwa (suara tidak terdengar).

Kemudian yang kedua mengenai POJK nomor 11 tentang relaksasi emang salah satu itu akan sangat membantu debitur maupun karena tidak perlu mencadangkan tetapi CAR itu tidak mencukupi di satu sisi harus perhitungkan kepada Sisi dari pendanaan nasabah (suara tidak terdengar).

Karena kalau mereka Bang melakukan relaksasi kemudian melakukan penundaan pembayaran pokok debiturnya melakukan pembayaran pokok selama 1 tahun apalagi kemudian ada relaksasi terhadap bunga maka arus kas dari perbankan tersebut akan bermasalah, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya terjadi mekanisme yang dipikirkan OJK untuk hal ini, karena menurut saya ini adalah merupakan dan sangat penting di saat bisa menjaga psikologis dari pemegang dana.

Yang ketiga adalah, masalah disebutkan di dalam kewenangan yang masuk di dalam Perpu itu adalah kewenangan OJK pertama adalah di dalam melakukan merger maupun akuisisi, cara kedua yang yang perlu di pendapat penjelasan lebih mendalam itu mengenai adanya keterbukaan di pasar modal yang menurut saya ini hal yang sangat penting karena kita tahu bahwa Pasar modal ini adalah sifatnya simetris informasi tetapi ketika dan disebutkan di dalam kewenangan yang kemudian tersebar di dalam atau 21 c dan kemudian ada sanksi pidananya di pasal 26, maka ini akan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar Bagaimana pasar modal kita ini akan berjalan kalau keterbukaan informasi ini ya ini menjadi katakanlah hal yang dikecualikan, ini menurut saya hal yang perlu diluruskan perlu disampaikan dengan jelas pertimbangannya karena ini akan mengganggu mekanisme pasar modal secara keseluruhan dan terutama dalam hal ini tentu yang memiliki informasi yang lebih akan mendapatkan bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini.

Yang berikutnya tentang masalah sejauh mana OJK melakukan proses bisnis terhadap relaksasi relaksasi yang di lakukan ini karena ini juga akan menimbulkan rasa ini juga ingin melihat proses-proses bisnis yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk hal ini, yang terakhir adalah Bank dalam pengawasan intensif Apakah Bank ini nantinya tidak termasuk di dalam di dalam Perpu ini nantinya karena menurut saya ini sebelum ada covid19 atau perusahaan perusahaan jasa memang sudah bermasalah sejak sebelum adanya covid19.

Demikian terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Andreas atas seperti Pertanyaannya selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar silakan Putri Komarudin.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Terima kasih Pak Dito atas kesempatannya Selamat siang untuk bapak ibu dari OJK beserta anggota Komisi XI yang terhormat semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kesiapan juga ketepatan dari teman-teman dan rekan-rekan OJK kalian yang telah menggunakan massa working from home ini dengan baik sehingga isu-isu yang terjadi termasuk terkait dengan relaksasi Kredit bisa langsung di handle dengan POJK penyusunan POJK yang memang (suara tidak terdengar) namun demikian seperti yang kita susun kebijakan tidak akan selalu tepat sasaran ketika pelaksanaan di lapangan nya masih bergantung dengan para aktor yang menggunakan kebijakan itu.

Jadi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk Bersimpati dulu Hari ini saya mendapat salah satu sopir online yang ada di daerah pemilihan saya warga di Bekasi Cikarang itu bunuh diri, karena beliau tidak bisa membayar cicilan mobilnya sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya padahal sudah ada kebijakan dari OJK untuk yang seperti tadi Pak Wimboh sudah apa Jelaskan kepada kita semua juga untuk relaksasi dari kredit dan juga leasing, jadi saya harap adalah saya meminta OJK dan juga lembaga Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan edukasi terkait relaksasi kredit (suara tidak terdengar)Menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, jadi berdasarkan aspirasi dari rekan-rekan bank di daerah pemilihan saya (suara tidak terdengar) Dan juga ada informasi yang dan juga ada informasi yang menyebutkan Bahwa hanya nasabah yang terkena virus Corona dan bukan yang terkena dampak ekonomi dari virus tersebut yang akan mendapatkan relaksasi dari kredit.

Mungkin saya rasa hal seperti itu harus diluruskan karena isu yang berkembang di lapangan itu nantinya akan membuat masyarakat semakin bingung Untuk menafsirkan peraturan tersebut sehingga nanti akan menghambat kinerja perbankan dan juga perusahaan leasing dan institude keuangan non bank lainnya, jadi saya apresiasi usaha yang telah dilakukan oleh OJK sampai Sekarang dan juga mendorong OJK untuk terus melakukan sosialisasi kebijakan kredit tersebut, saya juga selalu memantau sosial media dari OJK sendiri di mana sekarang banyak bahan-bahan yang dibutuhkan lebih menarik untuk dilihat masyarakat dalam komik dan juga dengan bahasa bahasa yang mudah dimengerti, Saya harap ini akan dilakukan.

Selain itu juga ada beberapa masukan dari para pelaku perbankan juga di mana Saya yakin Pak Wimboh dan juga rekan-rekan anggota dewan komisioner terkait dengan kredit non pemerintah, jadi Walaupun ada grace period atau penundaan pembayaran pokok tetapi nasabah bisa membayar bunga lebih murah apabila dibantu dengan subsidi pemerintah untuk kredit yang non pemerintah, jadi banyak teman-teman dari perbankan juga yang menilai bahwa anggaran dari pemerintah dapat dijadikan untuk subsidi bunga pinjaman karena apabila angsuran pokok dan bunga yang ditanggung APBN tentu akan sangat memberatkan misalnya yang tadinya kredit memprogram kisaran bunganya (suara tidak terdengar) Apa itu menjadi 6% maka potongannya pasti akan besar sekali sehingga memberikan keringanan Khususnya nasabah UMKM.

Yang berikutnya adalah (suara tidak terdengar) kredit juga berpotensi akan kondisi likuiditas bank seperti yang Pak Andreas telah sampaikan, khususnya Bank Beraset kecil dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR jadi apabila kondisi ini disertai dengan kecenderungan penarikan dana oleh nasabah maka dapat Menekan likuiditas bank tersebut, dan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dampak penerapan relaksasi ini terhadap keuangan bagi Bank Beraset kecil atau BPR dan Apakah kedepan akan memberikan relaksasi dan kelonggaran terhadap bank-bank tersebut.

Mungkin ini yang terakhir OJK juga telah menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 yang mengatur terkait dengan relaksasi kredit bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan jadi apakah kedepannya OJK juga akan mengatur relaksasi bagi industri fintech utamanya nasabah dari (suara tidak terdengar) yang berizin dan juga terdampak dengan covid 19, Demikian dari saya terima kasih banyak.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Kepada fraksi Gerindra kami persilahkan Fraksi Gerindra kapoksi Pak Supriyanto untuk mengatur siapa yang akan ditugaskan silakan Pak Supri.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SOEPRİYATNO):

Di putaran pertama Nanti Pak Kamrussamad ketua.

KETUA RAPAT:

Baik silakan Pak Kamrussamad waktu kami persilahkan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Terima kasih pak ketua.

Pimpinan komisi 11 dan anggota yang dimuliakan oleh Allah.

Ketua dewan komisioner.

Dan anggota OJK.

Dan seluruh jajarannya.

Kelihatannya ketua OJK kita sangat bahagia mendapatkan penguatan payung hukum melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 tergambar sejak kemarin kami melihat prestasinya luar biasa semangatnya, perlu Bapak ketahui bahwa di tengah-tengah masyarakat Perpu Nomor 1 2020 ini sebetulnya sedang menjadi Diskusi yang sangat alot khususnya terkait berbagai macam kebijakan disektor keuangan negara dan kebijakan sistem keuangan industri jasa keuangan kita.

Karena itu sebelum nanti DPR pada waktunya membahas Perpu ini ijin saya beberapa hal ingin menyampaikan catatan terkait dengan kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh OJK dalam periode 1 bulan terakhir ini, yang pertama

kita sama-sama sudah mengetahui bahwa likuiditas perbankan dan juga lembaga pembiayaan non bank semuanya tentu terdampak dan mengalami kesulitan alangkah bijaksananya jika OJK juga memberikan satu kelonggaran khususnya kepada perbankan dan juga lembaga-lembaga keuangan Non bank agar mereka diberikan penundaan pembayaran pembebasan premi atau bahkan pembebasan premi terhadap OJK, Karena ini juga sebagai bentuk kepekaan kita (suara tidak terdengar)

Buat kementerian dan lembaga serta kepala daerah patuh terhadap keputusan itu karena itu dibutuhkan goodwill dari OJK untuk melihat situasi ini, yang kedua kami melihat bahwa OJK masih seperti Lembaga yang menyiapkan payung di saat Hujan sudah mulai turun belum melihat bahwa krisis hari ini adalah sebuah krisis yang belum pernah dunia mengalami yang melanda 202 negara, meruntuhkan negara itu tetapi jauh lebih besar setelah musim panas usai datang lagi gelombang kedua yang kemudian korban jutaan orang yang melanda Afrika barat Eropa sebagian dan Amerika dan di itulah kemudian akhirnya terbangun Tata dunia baru pada waktu itu.

Apakah OJK coba berpikir think in the box, tidak sekedar melihat Bagaimana menyiapkan payung-payung relaksasi payung-payung stimulus, tetapi lebih dari itu bagaimana pertama kita melihat bahwa fundamental masalah ini adalah krisis kesehatan Walaupun Bapak memberikan stimulus sebaik apapun dunia perbankan di pasar modal jika problematika krisis utama kesehatan ini tidak selesai pak pemerintah belum bisa mengendalikan sepenuhnya maka kepercayaan publik kepercayaan pasar kepercayaan investor itu belum tentu kita bisa dapatkan, karena itu kita saksikan itu kita bisa ukur ketika jam 2 siang ketika Presiden Jokowi pidato di Istana Bogor menyampaikan kebijakan fiskal Besoknya tidak terlihat optimisme dari pasar terhadap menyambut kebijakan fiskal itu karena mereka masih membandingkan bagaimana pemerintah Indonesia dengan negara lain pemerintah negara lain dalam menangani fundamental masalah ini, yaitu krisis kesehatan.

Apa kaitan dengan OJK pertama saya ingin menyampaikan bahwa warga kami di Jakarta sekarang ini sudah ratusan ribu pemudik kembali ke pulau Jawa, kembali ke Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Kenapa demikian, karena mereka tidak bisa lagi bertahan hidup di Jakarta yang biaya tinggi mereka selama ini kehilangan pendapatan, mayoritas mereka itu menggunakan kendaraan motor Pak kendaraan bermotor roda dua yang mereka Cicil selama ini dari perusahaan pembiayaan Terus kalau kita berikan penundaan 1 tahun artinya bulan Maret tahun depan mereka harus kembali membayar, sementara belum tentu mereka pada bulan depan atau 2-3 bulan 6 bulan lagi mereka ada pendapatan itu artinya kita menuntut masalah dan ingat Pak Krisis kesehatan krisis ekonomi bisa kemudian berdampak pada krisis sosial.

Karena itu harusnya OJK memberikan masukan kepada pemerintah supaya bukan ini memberikan subsidi pembayaran terhadap cicilan khusus untuk roda dua pak sehingga perusahaan pembiayaan itu tidak PHK Pak, tidak tidak tutup perusahaannya dan tidak memihak karyawannya Pak. Konsep-konsep seperti ini menurut kami OJK Harus berpikir Out thinking the box kalau tidak Pak kalau semuanya tidak berani mengusulkan ke pemerintah konsep-konsep seperti ini maka selamanya Rakyat middle low akan kesulitan menghadapi karena itu kita kita akan tetap mengalami kesulitan, karena kita hanya ... mengenai

Restrukturisasi Pembiayaan khususnya warga kita di perusahaan pembiayaan yang cicilan kendaraan roda dua.

Berikutnya Pak bagaimana dengan UMKM yang selama ini tabungannya hanya bisa buat bulan-bulan pertama Pak Nah kalau kita tunda hanya memberikan tunda untuk satu tahun Pak, sementara Mereka pun ekonominya betul-betul tutup berhenti tidak semudah orang yang bekerja secara buruh harian untuk mendapatkan pekerjaan lebih sulit lagi pak, jadi saya mohon ini OJK kembali mengkaji kebijakan ini yang kami menilai hanya menunda permasalahan tetapi tidak menyelesaikan masalah.

Berikutnya pak bapak kemarin Kalau tidak salah ingat menyampaikan bahwa telah menutup 102 bank ya, pak ketua ya Pak Wimboh, Kalau tidak salah ingat 102 bank 101 BPR dan 1 bank umum Benar ya pak ya pak, pak Halim ya pak.

Kalau begitu saya ingin masuk kaitan dengan pengawasan Pak, Beberapa waktu yang lalu ada banyak nasabah dari Mina padi Pak mereka mempertanyakan Bagaimanakah pemerintah dalam hal ini termasuk DPR termasuk OJK dalam menyelesaikan masalah minapadi ini mohon penjelasan lebih detail progres seperti apa penyelesaiannya seperti apa dan seterusnya termasuk penyelesaian masalah hukum dan juga penyelesaian terhadap pengembalian investasi para warga negara kita.

Kemudian Pak berikutnya sekarang ini ada kegelisahan pak Indosurya pak mungkin pak ketua OJK mengikuti perkembangan tentang indosurya apa ini sebagian warga DKI Jakarta tuh banyak di sini pak yang terdampak daripada Indosurya ini nah ini kalau boleh Bapak bantu jelaskan apa sebetulnya yang terjadi Indosurya ini supaya kami bisa memberikan juga edukasi kepada masyarakat tentang kasus-kasus seperti ini, selanjutnya yang terakhir pak, pak ketua yang terakhir yang saya ingin sampaikan yaitu masalah, masalah yang berkaitan dengan di daerah-daerah Pak pengusaha-pengusaha daerah, kan Bapak perlu tahu Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat edaran tentang penghentian pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK.

Nah itu Pak mau sampaikan kebijakan itu kemudian membuat pengusaha-pengusaha daerah itu teriak yang kira-kira asetnya itu perputarannya antara 1 sampai 5 miliar Pak kesulitan sekali dengan adanya hal itu ini kan bisa juga berdampak pada mengenai perbankan dan juga lembaga-lembaga keuangan lainnya di daerah. Jadi Bapak tolong kalau boleh siap juga berikan juga kepada kami dan pemerintah Jika kebijakan-kebijakan seperti ini serta merta diambil itu mempengaruhi percepatan atau laju serta pertumbuhan sektor riil pak. Bagaimana bagaimana kebijakan stimulus Jika DAK nanti kan itu pengusaha pengusaha lokal di daerah semuanya gigit jari mereka mengatakan tahun ini kita tutup buku, Oke kalau tutup buku karena pandemic karena pandemic mungkin mereka bisa memahami bagaimana langkah kebijakan stimulus kita supaya mereka ada harapan untuk bisa bertahan ke depan, demikian Ketua Pimpinan Terima kasih saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kamarusamad yang telah mengajukan kedalaman Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi Partai Nasdem Pak Hasbi Ansori sebagai kapoksi siapa yang akan ditugaskan Pak Hasbi.

F-P. NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Fraksi Nasdem menugaskan Yesi Melani memberikan pendalaman.

KETUA RAPAT:

Baik Ibu Yesi silakan.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Ya hadir ketua.

Terima kasih Pimpinan dan seluruh dewan komisioner dari OJK beserta jajaran.

Pada hari ini saya hanya ingin (Suara tidak terdengar) perspektif betul sama di daerah juga masih belum terdapat persamaan perspektif, beberapa hal yang memang harus digarisbawahi Disini yang pertama harus keluar dulu di tengah-tengah masyarakat dan pemberi pinjaman itu sendiri agar tidak terjadi kegaduhan di publik dan dari pihak OJK juga dalam hal ini sangat dinanti ketegasannya terutama menyangkut kebijakan yang seperti apa strategi implementasi di lapangan seperti apa apa bawa sana juga seperti apa itu sangat dinanti oleh masyarakat kita.

Dan juga harus berani secara tegas memberikan sanksi kepada lembaga pemberi pinjaman yang dalam hal ini masih membandel dalam tanda kutib yang padahal sudah dapat edaran dan sudah di bawah naungan daripada OJK sendiri. kemudian saya juga berpikir pak ketua Apakah tidak perlu dibuat semacam call center khusus untuk menangani kondisi yang seperti ini karena pada saat sekarang masyarakat kita untuk berkomunikasi sangat sulit dan bahkan didalam call center itu kalau bisa Bila perlu ada semacam mekanisme yang menerima keluhan masyarakat keluhan debitur kita menyangkut pertama depkolektor yang saat ini juga masih banyak berkeliaran dan bahkan ada depkolektor yang secara tegas menyatakan bahwa mereka belum menerima arahan apa-apa dari pusat mereka belum menerima peraturan terbaru dan Bahkan mereka mengancam juga pada debitur kita untuk sampai membuka data mengancam untuk meminta segala macam ini kan satu hal yang saya pikir semakin memburuk psikis mental masyarakat kita, dan selain itu juga harus disampaikan secara rutin report kepada masyarakat perbankan mana saja yang sudah menerapkan ini dan sudah mengimplementasikan ini harus jelas dulu kepada masyarakat.

Karena daerah ini Bapak masih banyak sekali debitur kita yang merasa susah untuk berkomunikasi mereka menelepon via telepon berkoordinasi kepada kantor kantor tidak memberikan jawaban mereka malah mengarahkan kantor pusat terdekat sementara kondisi wilayah kita saat ini kita sangat dibatasi untuk berinteraksi secara fisik ini juga menjadi pertimbangan untuk dibuat call center khusus.

Kemudian yang kedua Saya melihat dana CSR Apakah tidak bisa OJK ini mendorong perbankan untuk bisa mengalokasikan dana CSR ini secara linier sampai daerah jadi dalam artian tidak terpusat oleh bank-bank negara atau bank swasta di pusat saja tetapi sampai ke daerah juga harus contohnya saja di setiap

provinsi kabupaten ada di setiap bank kalau bisa dikoordinir untuk bisa dana CSR yang ada di bank itu didistribusikan untuk APD masker dan segala macam mungkin kacamata pelindung wajah untuk masyarakat kita di sini terutama tenaga medis kita dan selain itu juga saya berpikir bahwa dana CSR ini bisa dialokasikan untuk membantu kelompok-kelompok UMKM yang betul-betul kesusahan contohnya mereka bisa membantu untuk produksi masker kain kemudian juga membantu pemerintah dalam percepatan pembagian sembako dan lain-lain untuk masyarakat saya pikir Tidak ada salahnya dan mungkin mekanismenya regulasinya OJK bisa siapkan Bagaimana supaya fleksibel juga karena betul tadi sudah disampaikan dari Fraksi Gerindra Kalau tidak salah itu bahwa krisis kita bukan krisis ekonomi tapi krisis kesehatan itu yang paling utama.

Ekonomi akan seiring membaik jika kesehatan kita juga semakin meningkatkan progress menuju baik mungkin itu saja Bapak Pimpinan dapat kami sampaikan terima kasih selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Selamat siang Terima kasih Ibu Yesi Melani.

Selanjutnya kayak persilakan dari Fraksi PKB kapok si Ibu Ela siapa yang akan ditugaskan Ibu Ela.

Bu Ella ada disini Bu Ela kalau nggak ada Pak Fatan ada disini PKB nggak ada Pak Atan Bu Ella tidak ada.

F-PKB (BERTU MERLAS):

Ada pimpinan.

Sudah saya sudah saya sendiri terima Kasih pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati komisioner OJK beserta jajaran dan yang saya hormati saya banggakan teman-teman anggota Komisi XI.

Jadi selama ini kita berkuat yang diajukan OJK ini mengenai kredit kendaraan bermotor saja dan itu saya kira sudah sangat tepat tindakan dari OJK untuk memberikan relaksasi kepada debitur kendaraan bermotor yang sifatnya untuk kendaraan untuk kendaraan komersial ya, jadi seperti ojek dan lain-lain itu diberikan relaksasi yang yang cukup bagus menurut saya bagi OJK. Namun demikian ini bukan cuma untuk kendaraan bermotor saja yang perlu menjadi perhatian khusus, yang menjadi perhatian khusus terutama masalah UMKM kredit kredit kur ini banyak sektor yang sama sekali tidak bisa kerja, sehingga mereka kehilangan omsetnya sama sekali habis semua omsetnya. Nah ini bagaimana jalan keluarnya, saya tidak tidak habis pikir ini bagaimana bisa menutupi kreditnya karena kalau ini tadi sampai tidak ada omset bukan sekedar dia tidak mampu membayar bunga tapi mereka juga makan modal, mereka itu kerja gajinya ada di situ dagangannya ada di situ, makannya juga ada di situ. Jadi kalau mereka ini tidak diberikan relaksasi khusus istilahnya treatment khusus ini modelnya bisa habis dimakan untuk makan hari hari.

Ini saya kira perlu pemikiran yang lebih dalam bagi OJK untuk memikirkan kur ini tadi UMKM UMKM yang omsetnya habis karena akibat dari dampak covid 19 ini tadi, saya kira demikian saja pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bertu yang telah mewakili dari PKB Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat, kapoksi Bu Vera silakan siapa yang akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

Sebentar Pak Fathan Kenapa Fathan. silakan Bu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Ya terima kasih pimpinan Sebelum saya hari ini akan menjadi juru bicara adalah Pak Hasan namun saya ingin mendapatkan juga Langsung dari Pak wimbo terkait dengan pertanyaan saya tertulis yang ada dalam halaman slide nomor 21 namun di dalam halaman yaitu halaman nomor 6 Tetapi kalau di slide nomor 21 saya sudah minta kan jawaban tertulis mohon itu nanti bisa dijawab secara komprehensif, namun selanjutnya saya serahkan kepada Pak Asan untuk memberikan pertanyaan silakan Pak Marwan.

F-PD (MARWAN CIK ASAN):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua dan para anggota Komisi 11 yang terhormat.

Kemudian ketua wakil ketua dan anggota komisioner yang saya hormati.

Tentu yang pertama kita bersyukur Alhamdulillah hari ini semua kita hadir baik secara virtual wajahnya sehat-sehat dan dalam keadaan semuanya Insya Allah bebas virus Corona.

Bapak ketua OJK saya akan berbicara terhadap tiga isu strategis, Yang pertama adalah tentang stimulus-stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK baik di bidang pasar modal perbankan maupun hal yang lain pertama tentu kami dari Fraksi Partai Demokrat apresiasi atas berbagai stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK melalui (suara tidak jelas) tetapi ada banyak hal yang perlu dilakukan review oleh OJK pertama adalah stimulus-stimulus yang disampaikan oleh OJK ini tidak terinformasi dengan baik pada masyarakat, baik di awal maupun di akhir.

tadi dari dari beberapa rekan di Dapil sudah menyampaikan termasuk di Dapil saya karena masyarakat apa namanya kadang-kadang(suara tidak jelas)Terhadap pelaksanaan stimulus ini. jadi rekomendasi kami pertama tolong sosialisasi dan edukasi tentang POJK POJK, terkait stimulus ini tolong sampaikan kepada masyarakat secara jelas dan detail itu yang pertama.

Yang kedua terkait stimulus ini menurut kami ini masih kurang tajam dan kurang luas Pak Bimo kita jangan tanggung-tanggung kalau mau menolong rakyat kalau kita tentang menolong rakyat itu sama saja kalau kita membantu orang sakit itu setengah sembuh ujungnya nanti malah dia jadi kambuh dan nanti kronis. OJK

harus berani memberikan rekomendasi rekomendasi yang strategis tajam dan dalam kepada pemerintah karena terkait stimulus yang dapat menolong rakyat Saat ini. misalnya OJK bisa merekomendasikan pembebasan cicilan kredit kendaraan bermotor bagi masyarakat atau tukang gojek yang kena Dampak krisis ini Kemudian yang kedua OJK bisa juga memberikan rekomendasi terkait misalnya pembebasan bunga dan lain sebagainya terhadap UMKM yang terkena dampak, UMKM saja Pak di kampung-kampung itu sektor pertanian juga kena Pak.

Harga komoditas murah kemudian mereka susah jual itu bagaimana mereka (rekaman tidak jelas) itu bagaimana kita harus berani memberikan rekomendasi ini karena negara menganggarkan 405 triliun kemudian 150 triliun untuk sektor usaha Kenapa OJK tidak merekomendasikan itu dalam rapat dan sebagainya sehingga konkrit dan jelas apa yang dinikmati oleh rakyat Saat ini karena pemerintah termasuk OJK itu setengah kopling menolong rakyat totalitas Pak ini kalau kita mau berbuat untuk rakyat.

Kemudian yang ketiga Pak masih terkait stimulus yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pun juga ini Timor Leste mulus yang dikeluarkan ini akan berdampak termasuk juga terhadap kinerja (rekaman tidak jelas) apa Mitigasi resiko yang sudah disiapkan OJK untuk nanti kalau Insyaallah kita sudah keluar dari krisis ini kan kita akan hidup normal kembali ini kan Pak Insyaallah Bagaimana setelah itu nanti apa yang akan kita siapkan supaya Jangan nanti setelah dari sini berlalu kita tidak punya apa-apa yang terjadi adalah krisis yang berkelanjutan itu terkait dengan stimulus Pak.

Yang kedua adalah Saya ingin bertanya (rekaman tidak jelas) yang dilakukan oleh kksk di dalamnya ada OJK sudah sampai di mana ukuran kekuatan(rekaman tidak jelas) sudah sampai kalau kita ambil itu kalau memang tidak mungkin disampaikan di apa namanya di Virtual meeting ini mungkin Bapak bisa sampaikan dengan cara(rekaman tidak jelas) kita mau dengar Pak, Menkeu di skenario terburuk ekonomi kita kan ini bisa sampai Rp20.000 juga didukung oleh Meneg BUMN(rekaman tidak jelas).

Yang ketiga adalah tentang Perpu Pa Perpu nomor 1 tahun 2020 ini memang Perpu harus kita amati secara mendalam Kemarin tidak sempat bicara Bagaimana mungkin APBN itu diatur dalam Perpres undang-undang dasar kita dan undang-undang(rekaman tidak jelas) dan itu tidak dikecualikan Pasal itu dalam Perpu walaupun harus diatur harusnya postur APBN itu diatur laut di Perpu nomor 1, tetapi Nantilah ini kita akan bicara bahkan setelah Perpu itu masuk pada masa sidang nanti kita diskusikan.

Di Perpu ini Pak pasal 23 OJK punya kewenangan paksa untuk menggabungkan Memergerkan dan lain sebagainya Berbagai usaha. Saya mau tanya bagaimana kondisioning nya seperti apa(rekaman tidak jelas) dalam menggunakan Perpu ini karena bagaimanapun juga yang namanya penggabungan dan sebagainya Itu bukan cuman menemukan para pemegang saham saja tetapi disitu ada karyawan ada para nasabah nah ini tanpa harus kita pikirkan dampaknya jadi dari kami terkait rapat dengar OJK ini tinggal satu stimulus kami minta lebih tajam dan lebih dalam bersosialisasi dengan baik tidak usah takut takut kalau menolong rakyat totalitas kita tetap lakukan(rekaman tidak jelas).

Kemudian yang kedua adalah stress test yang kita lakukan (rekaman tidak jelas) kita bicara kurs, salah satu indikatornya kurs yang kita pakai. yang ketiga adalah Perpu ini pak akan digunakan OJK seperti apa Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terima kasih pak ketua, *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Marwan, baik selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Keadilan PKS kapoksi bapak Junaedi Ali dari, silakan Pak Junaidi auly.

F-PKS (Ir. H. JUNAIDI AULY, MM):

Baik terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Bapak ketua komisi XI dan wakil ketua serta bapak ibu Komisi XI yang kami hormati.

Bapak commissioner OJK dan jajarannya.

Serta anggota Komisi XI yang kami hormati.

Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dan kita berdoa semoga kita semua diberikan perlindungan diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari amin.

Bapak Ibu sekalian.

Dari beberapa poin yang tadi sudah disampaikan banyak yang sudah ditanggapi oleh (rekaman tidak jelas) yang pertama saya merasa bahwa Perpu yang diusulkan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini saya nggak tahu persis kemarin sudah diajukan (rekaman tidak jelas), tadi ada beberapa masukan yang disampaikan terkait dengan pasal-pasal yang dianggap krusial yang juga mungkin catatan pasal yang cukup krusial itu terkait dengan pasal 27 ayat 1 2 dan 3 karena di sana seolah-olah ada kebebasan penggunaan uang negara secara semuanya dalam tanda kutip yang dilindungi oleh (rekaman tidak jelas) dan dan bebas itu yang menjadi catatan kami Perpu ini oleh karena itu tadi sebaiknya kalau memang ada pasal-pasal belum disampaikan secara resmi baiknya direvisi sebelum disampaikan secara resmi.

Kemudian yang kedua terkait dengan Poin yang ada di dalam Perpu itu sendiri khususnya untuk OJK ada kewenangan dari OJK memberi perintah tertulis kepada lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan peleburan pengambilalihan (rekaman tidak jelas) ini sebenarnya merupakan terobosan untuk menanggulangi adanya permasalahan likuiditas pada Otoritas Jasa Keuangan. yang yang juga karena kemungkinan penyalahgunaan wewenang Untuk kepentingan sebuah lembaga yang sebelum keadaan ini sebenarnya telah mengalami masalah dari segi likuiditas kita tahu seperti

Jiwasraya Asabri jadi jangan pula Perpu ini tempat bunyinya Bell out untuk mengatasi yang sebelum krisis sebenarnya sudah menjadi masalah.

oleh karena itu kita ingin proses penggabungan atau ada kewenangan OJK ini tidak merugikan berbagai pihak, kemudian yang kedua ini juga bisa berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh sekelompok orang, karena sebenarnya hal-hal seperti ini tadi tidak dibenarkan adanya pengaturan kasus dengan dalil penyelamatan Oleh karena itu OJK memiliki langkah yang menjamin bahwa proses penggabungan peleburan pengambilalihan integrasi(rekaman tidak jelas).

Yang mekanisme yang(rekaman tidak jelas) benar-benar clear and clean itu yang kami harapkan selain itu kita juga ingin melihat sampai sejauh mana kssk yang juga OJK di dalamnya adalah untuk menyusun prosedur penggunaan cadangan pemulihan ekonomi berdasarkan mekanisme yang perlu dibuat misalnya tentu saja untuk penyelenggaraan pelaksanaan ini perlu dilakukan assessment, asesmen ini juga harus jelas karena nanti kalau assesment itu juga tidak jelas itu akan membuat kebingungan di pelaksanaannya dan juga ada kemungkinan moral Hazard di dalam pelaksanaan.

Oleh karena itu , itu juga menjadi perhatian kita supaya mekanisme lagi-lagi mekanisme yang harus diperjelas juga termasuk yang terkait dengan stimulus-stimulus ini juga ga(rekaman tidak jelas).

Kalau misalnya ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kecil seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Marwan ini misalnya masyarakat petani dan sebagainya (rekaman tidak jelas) dan juga sampai sejauh mana kekuatan monitoring dari OJK terhadap likuiditas dari masing-masing industri (rekaman tidak jelas).

Saya kira ini beberapa poin saja dari saya mungkin kalau ada kesempatan lain mungkin bisa disampaikan oleh anggota yang lain yang secara prinsipnya adalah kalau ini masih bisa kemudian juga kalau perlu juga mekanisme Yang tadi kita perdebatan atau kita bahas sebaiknya juga diperjelas sebelum kita menerima atau tidak menerimanya Perpu nomor 1 tahun 2020.

Terimakasih *Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Baik Pak Junaedi terima kasih Jadi kami sampaikan ke Pak Junaedi maupun kepada seluruh anggota maupun pimpinan komisi 11 yang akan mengajukan pendalaman bahwa kita tidak membahas sama sekali karena perpu seperti amanat paripurna yang lalu akan dibahas di banggar jadi hari ini kita adalah rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Baik selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Pan Pak Jon erizal sebagai kapoksi siapa yang akan diberikan kesempatan untuk pendalaman silakan Pak Jon.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):

Terima kasih pimpinan.

Daripada nanti yang akan menyampaikan Pak Pak Tohir kalau bisa putaran ini tolong beberapa kali ini karena banyak pertanyaan namun Saya mengingatkan kembali pimpinan Jangan lupa nanti setelah setelah sebelum ditutup dipastikan lagi bahwa pertanyaan-pertanyaan tertulis sama kualitasnya dengan lisan yang disampaikan Pada pertemuan yang sekarang silakan Pak Hafiz.

F-PAN (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):

Ketua Pak Jon dan kapoksi terima kasih.

Yang saya hormati pak wimboh Santoso dan rekan-rekan OJK yang menyaksikan pada virtual Rapat ini.

Yang pertama Pak wimboh yang pertama Pak saya melihat PHK ini akan semakin banyak pertama karena kita memang agak late respon covid 19 Juni yang kedua memang ke situasi Global dunia juga tidak berpihak tinggal semua kegiatan-kegiatan ekonomi (rekaman tidak jelas) mengalami dekonstruktif, saya juga melihat ada kelemahan koordinasi pusat dan daerah yang mengakibatkan lambatnya respon kita dalam menangkal covid 19 ini khususnya mandi bidang jasa keuangan.

Dari sisi kesehatan saja kita sudah banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada seperti hari ini saya menangkap jubar kesehatan mengatakan bahwa angka meninggal 209 bagaimana mungkin di (rekaman tidak jelas) saja sudah 400, ini saya ingin mengatakan bahwa lemahnya kita dalam merangkum data-data, sehingga ini akan memperlemah juga koordinasi kita dalam menangani atau menyelesaikan pelemahan ekonomi nasional, PHK tentu saja dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang hanya 2,5% tinggal itu pasti akan melanda nasional dan saya yakin industri jasa keuangan akan Pelan-pelan akan terimbas kepada Pelemahan ekonomi.

Karena seperti yang disampaikan kemarin termasuk 9 industri yang terkena langsung Akibat covid 19, pak Wimboh yang saya hormati saya melihat stimulan menjadi suatu keniscayaan yang harus kita lakukan sehingga saya sangat memahami kenapa kemarin Pemerintah mengajukan pelebaran revisi bahkan sampai ke 5,07% karena memang paling tidak pending government satu-satunya yang bisa mengobati terhadap runtuhnya perekonomian dunia yang berimbas kepada nasional, maka dari itu tadi yang disampaikan oleh Pak Marwan sepakat jangan tanggung-tanggung kalau tanggung kita akan kerja dua kali, dan kalau kita kerja dua kali kita akan kehilangan waktu uangnya yang cukup besar, karena akhirnya saya kira itu akan kembali juga ke negara dalam bentuk pembayaran pajak dan PNB, paling tidak kehidupan ekonomi akan berjalan baik, politik akan stabil kriminalitas akan turun paling tidak kerusuhan seperti di India bisa kita hindari singkatnya saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kita lolos dari maut covid 19 tapi kita mati ditangan perusuh, karena tidak mungkin tertutup akan terjadi masalah sosial kalau kita tidak segera menyelesaikan soal Ekonomi kita dengan baik dan terarah.

Maka dari itu ketua saya mengusulkan Bahwa perlu juga kita minta DPR komisi XI ini meminta kepada KSSK,(rekaman tidak jelas) saya mengusulkan agar

kita meminta KSSK untuk menyusun prosedur kegunaan cadangan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan asesmen dilakukan oleh OJK tentu saja untuk kebutuhan likuiditas dan solvabilitas industri Jasa keuangan, supaya kita cepat melihat sumbernya dari mana Penyakit ini dan kita tahu akan menyelesaikan dari Sisi yang mana Kemudian juga saya kira kita juga melihat disampaikan oleh Kamarusamad saya sepakat Pak di Jakarta khususnya, saya tinggal di Tangerang Selatan para Tukang, pegawai salon, ojol, taksi, Juru parkir, sudah mulai kebingungan selanjutnya saya khawatir ini akan menjadi kriminalitas, sehingga kami pun meninggalkan rumah berpikir dua kali, maka dari itu percepatan stimulan ini menjadi keharusan bagi kita, undang-undang Dasar 45 mendukung keselamatan nyawa warga merupakan hukum tertinggi di Republik ini, artinya dia nomor 1 dan saya mempunyai catatan dulu ketika Amerika Serikat Mengalami great recession tahun 28 sampai 38 John Mana punya rumus bahwa ketika itulah maka negara harus hadir dalam bentuk spending government, apa yang dikatakan (rekaman tidak jelas), maka saya kira (rekaman tidak jelas) ini Jika memang ini bisa kita rumuskan secara baik dan terarah Saya yakin pengobatan kepada Pelemahan ekonomi ini akan Sedikit baik menimbulkan pertumbuhan yang bisa kita harapkan seperti yang diprediksi oleh World Bank kalau kita benar maka kita akan tumbuh di 2,1% Tetapi kalau kita tidak benar dan tidak terarah kita akan minus 3,5% berbahaya sekali.

Akhir kata saya juga menyampaikan walaupun kita tidak membahas Perpu nomor 1 tahun 2020 ini ketua saya ingin Menyinggung sedikit saja bahwa khususnya pasal 27 tersebut ini agak sensitif kami melihat bahwa walaupun dilakukan secara katakanlah itikad baik pasal 27 tersebut tetapi hukum positif kita mengharuskan itu harus diuji oleh Hukum terlebih dahulu sehingga menurut hemat Saya tidak perlu dicantumkan kalau memang masih memungkinkan karena itu akan membuat impretasi orang berbeda terhadap stimulan yang besar tetapi bukan berarti kami tidak mendukung ke arah tersebut tetapi yang saya sampaikan adalah kita sudah cukup memiliki hukum lain di atas hal tersebut sehingga imunitas saya kira tidak menjadi hal yang harus kita cantumkan, Saya kira itu pak ketua lebih dan kurangnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ahmad Tohir yang telah mengajukan pendalaman baik selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ibu Wartiah silakan ibu Wartiah.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpin rekan anggota Komisi XI DPR RI dan kepala OJK Yang saya hormati.

Terima kasih dan apresiasi yang sangat besar kepada OJK yang telah memberikan pemaparan terkait dengan update kondisi industri jasa keuangan di tengah merebaknya virus ke-19 yang terjadi Di negara kita ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada bapak ketua OJK terkait dengan Bagaimana kondisi terkini jasa keuangan hari ini kemarin kita sudah mendengarkan

pemaparan panjang dari Kementerian Keuangan terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan karena ada penambahan anggaran belanja dan pembiayaan 2020 untuk penanganan covid 19.

Total belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan covid19 adalah sebesar 405,1 triliun yang salah satu poinnya adalah 70, 1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus(rekaman tidak jelas). pertanyaan kami adalah yang pertama beberapa waktu lalu muncul kabar simpang siur di tengah masyarakat terkait dengan keringanan kredit selama pandemic covid19 ini yang harus diluruskan oleh pemerintah dalam hal ini adalah OJK, kami minta penjelasan terkait soal ini, apakah yang dimaksud dengan keringanan kredit ini juga Apa untuk kalangan bawah.

Saya membaca bahwa OJK hanya memberikan keringanan kepada perusahaan yang memiliki plafon kredit di bawah 10 miliar, masyarakat tentu bertanya apakah itu juga termasuk untuk perkreditan motor dan sebagainya atau hanya untuk menjamin kur saja karena beberapa waktu lalu pak presiden Sudah mengumumkan kelonggaran pembayaran kredit kendaraan selama itu selama 1 tahun untuk sektor informal seperti sopir ojek dan usaha kecil karena di NTB perusahaan leasing dan beberapa bank masih jalan terkait dengan penagihan di nasabah masing-masing.

Pertanyaan saya bagaimana aturan mainnya dan apakah ini sudah disampaikan pada perusahaan listing atau jasa keuangan dan sebagainya, lalu sampai mana komunikasinya dan Kapan dimulainya. pertanyaan saya selanjutnya adalah beberapa banyak bank yang sudah setuju dengan kebijakan ini yang kedua selanjutnya bantuan stimulan yang diberikan pemerintah ini tentu kami harus tahu sektor mana saja yang menjadi prioritas.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI dan Kepala OJK yang saya hormati.

Saya dari Dapil Nusa Tenggara Barat II yang meliputi Pulau Lombok Kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa salah satu sektor yang paling terkena dampak dengan covid19 ini adalah sektor pariwisata, Dan kami dari pulau Lombok yang merupakan wilayah pariwisata sangat merasakan dampak covid 19 ini maka dari itu melalui kesempatan pada hari ini saya meminta kepada OJK dan pemerintah untuk Betul-betul memberikan prioritas kepada sektor pariwisata khususnya mereka mereka yang terdampak seperti di nusantara barat khususnya dan tentu daerah lain umumnya.

Selain sektor Pariwisata NTB juga merupakan lumbung pangan nasional sektor pertanian harus juga menjadi prioritas beberapa bulan kedepan para petani masuk dalam masa panen jangan sampai kemudian dengan kondisi ini membuat para petani kita kebingungan untuk memasarkan hasil panennya karena saya dapat informasi bahwa beberapa pelabuhan di beberapa daerah sudah tutup dan hari ini Tentu saja saya juga ingin memberikan masukan kepada OJK merekomendasikan agar Bagaimana CSR bank bank Mitra untuk memprioritaskan dukungannya terhadap alat pengadaan kesehatan seperti masker APD dan lain-lain sebagainya.

Pada kesempatan Hari ini saya juga sepakat dengan anggota Komisi sebelumnya bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesimpulan dari masing-masing

masyarakat begitu sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting agar ada satu kesatuan pendapat tentang apa yang di kebijakannya OJK dan tentu saja sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kami mohon Pada kesempatan hari ini perhatian kita ditujukan kepada (rekaman tidak jelas) yang terdampak terdepan akibat covid19 ini.

Saya berharap kedepannya kita semua bersimpati kepada mereka terutama korban konflik 19 pada kesempatan Hari ini saya sampaikan terima kasih kepada bapak ketua atas kesempatan rapat virtual ini dan Sekali lagi saya berharap sosialisasi ditingkatkan dan paling penting adalah sosialisasi adalah mempercepat sosialisasi itu apa istilahnya itu ya dipercepat dipercepat apa istilahnya stimulus dipercepat ya itu intinya dipercepat saja supaya jangan terlalu panjang teorinya karena masyarakat kita ingin cepat mendapatkan manfaat dari akibat dari apa namanya kebijakan ini.

Saya kira itu dari saya terima kasih.

Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih ibu wartiah yang telah mengajukan pertanyaannya jam sekarang menunjukkan pukul 14 38 Saya kira kita masih bisa satu putaran lagi yang penting sesuai dengan protokol kita harus selesai dari pertanyaan dengan jawaban dari pemerintah sebelum masuk ke kesimpulan jadi saya kira masih diberikan kesempatan satu putaran lagi kami persilahkan dari Fraksi PDIP Perjuangan siapa yang akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada putaran kedua Pak Dolfie silakan.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Ya putaran kedua kesempatan untuk Mbak Indah untuk menyampaikan pendalaman Terima kasih pimpinan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih pimpinan.

Apakah dengar suara saya?

Terima kasih.

Selamat siang kawan-kawan semua Salam sehat.

Tentu kita saat ini bahwa kita saat ini berada dalam kondisi yang sangat tertekan kita stres kita panik Kita takut kita khawatir karena kita tidak tahu berhadapan dengan apa dan bagaimana cara mengatasinya dan kita juga tentu sepakat bahwa kita saat ini berada pada posisi perang melawan pandemic covid 19, dengan target lekas berlalu ini prahara kemudian sedikit korban dan banyak jiwa yang terselamatkan. Tekait kebijakan relaksasi kita saat ini berada dalam ekstra ordinary Maka Penanganannya pun saya berharap juga extra Ordinary.

Saya meminta kepada OJK agar melakukan kontrol dan pengawasan yang sangat ketat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan jangan membiarkan mereka masing-masing Masih memikirkan keselamatan bisnis mereka sendiri dan prestasi mereka sendiri dengan mengorbankan yang lain dampak covid ini tentu kita juga sepakat bukan hanya kepada menyerang kesehatan tetapi yang lebih adalah tekanan sosial ekonomi yang merupakan senjata pembunuh yang tak kalah hebatnya dengan virus itu sendiri.

Saat ini ada jajaran jajaran direksi yang baru dari Bank Exim yang membuat kebijakan menekan para debitur eksisting nya dengan meningkatkan suku bunga dan menurunkan plafon, salah satu debitur yang terimbas dari kebijakan tersebut adalah debitur yang potensial dan padat karya dia memberikan kehidupan bagi karyawan yang ribuan jumlahnya dan saat ini pun mereka masih aktif menerima order untuk mengisi rumah sakit yang diperuntukkan bagi para pasien covid di Kemayoran.

Saya rasa itu adalah kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan upaya kita untuk menyelamatkan jiwa manusia, saya meminta dengan sungguh Pak Wimboh melakukan pengawasan ketat kepada ini sebut langsung Bank Exim, sedikit yang kita lakukan tetapi berdampak banyak bagi masyarakat kita. Mari kita berlomba berbuat baik agar ada alasan bagi Tuhan untuk semakin dan segera menolong kita keluar dari prahara ini, saat ini tentu kita sepakat untuk itu terima kasih Ketua, terima kasih kapoksi, terima kasih kawan-kawan, salam sehat, semoga kita semua selamat dan bertemu lagi dalam situasi yang lebih menggembirakan saat ini kita prihatin dan memikirkan yang terbaik bagi keselamatan bangsa kita targetnya nya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa di Indonesia.

Terima kasih.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Baik Terima kasih Bu Indah Kurnia, pimpinan izin, saya pamit sebentar karena saya harus mengikuti rapat yang lain selanjutnya nanti untuk urusan kapoksi dipegang oleh Pak Rai dari Fraksi PDIP Perjuangan.

KETUA RAPAT:

Oke Baik Pak Dolfie silakan selamat bekerja.

WAKIL KETUA KOMISI XI (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S/F-PDIP):

Pak ketua saya Riko pak ketua saya juga dengan pada opsi izin untuk dengan fraksi ketua Lanjut nanti dengan teman-teman di bawah Pak Agung Rai.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Riko silakan, selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar dipersilakan pak sarmuji pak sarmuji ada di tempat Pak Sarmuji silakan.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Terima kasih ketua.

Yang pertama dari kebijakan relaksasi debitur yang disampaikan oleh OJK saya lihat BPR belum ada yang mendeklarasikan kesediaannya untuk bisa merestrukturisasi nasabah padahal nasabah BPR itu adalah nasabah yang sebagian besarnya saya rasa adalah nasabah dari kalangan UMKM, karena itu perlu secara khusus tentang nasabah BPR, dan menurut saya juga perlu perhatian yang khusus pula terhadap BPR nya sendiri, saya khawatir di tengah-tengah suasana yang sedemikian rumit BPR akan banyak yang tidak bisa bertahan dan ini tentu harus menjadikan antisipasi dari OJK untuk mengatasi suatu saat bersama LPS.

Yang kedua Saya ingin OJK bisa memaparkan sebenarnya seberapa kuat ketahanan sektor keuangan kita terutama perbankan kita hari ini apakah OJK sudah melakukan stretching stres pasca bencana covid ini karena kalau sesuai dengan skema yang kemarin disampaikan oleh Menteri Keuangan kalau Dolar Rp20.000, tentu ini akan sangat berat bagi sektor terutama perbankan kita, kira-kira bagaimana penjelasan OJK tentang ketahanan sektor keuangan kita terutama perbankan kita.

Yang ketiga, saya menambahkan Bu Indah tadi saya juga menerima hal yang sama saya berharap ada kontrol terhadap implementasi relaksasi kredit di saat kebijakan pemerintah melakukan relaksasi kredit jangan sampai ada lembaga keuangan atau perbankan yang justru berperilaku sebaliknya membebani pengusaha yang sebenarnya saat ini sudah pasti klenger sudah pasti terancam ambruk lagi-lagi Bank Exim yang menaikkan suku bunga kredit nya tolong juga diawasi oleh OJK.

Yang keempat ini titipan Bang Muhidin, didalam POJK nomor 11 itu ada stimulus bagi debitur. Apakah stimulus bagi debitur itu juga termasuk mereka yang memiliki kartu kredit, ini juga jadi perhatian kalau ini juga termasuk di dalamnya tentu juga banyak akan semakin berat.

Terakhir saya ucapkan terima kasih OJK kali ini menurut saya cepat terutama di pasar modal pasar modal kita akan masuk yang agak selamat (rekaman tidak jelas) sampaikan oleh Pak tadi tapi saya ingin tahu kira-kira tadi ada komitmen 33 emiten, untuk melakukan buyback kira-kira berapa trilyun jumlahnya, jadi kita bisa punya gambaran apakah buyback yang akan dilakukan oleh 33 emitan itu akan bisa mengangkat pasar modal kita menjadi lebih baik lagi. Karena Secara teoritis buyback dalam keadaan kondisi pasar terjun bebas sebenarnya hanya untuk menahan supaya tidak terjun terlalu dalam saja tetapi jumlahnya signifikan mungkin juga bisa mengangkat pasar modal kita menuju kembali ke di atas Rp5.000 bahkan mungkin bisa mendekati 6000 kembali.

Terima kasih *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarmuji, Terima kasih Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra, Siapa yang diberi kesempatan untuk, baik.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua yang terhormat.

Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPR Komisi XI yang kami hormati.

Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK yang kami hormati dan juga jajaran.

Ada tiga poin sebenarnya singkat-singkat yang pertama begini ketua OJK, saya ini mewakili daerah pemilihan Gorontalo provinsi yang sekarang bersama-sama dengan NTT masih dianggap sebagai 0% positif covid, tetapi kedua provinsi ini Gorontalo dan NTT ini adalah bisa dibilang provinsi ... dari dulu, ada 5 provinsi termiskin yang paling miskin termasuk NTT dan Gorontalo walaupun masih 0% covid, tetapi daerah minus seperti Gorontalo dan NTT itu kehidupan sosial ekonominya itu lebih banyak tergantung pada PNS, pegawai negeri yang digaji oleh negara.

Kredit-kredit yang ada di sana termasuk pada bank dan juga leasing itu kebanyakan adalah kredit para PNS, di daerah-daerah yang itu PNS itu, segitupun gajinya dia tetap masih banyak yang bergantung kehidupan ke dia, entah itu itu akan ada pengaruh sosialnya gitu pak Ketua OJK, ketika OJK mengatakan bahwa kredit PNS apa namanya penundaan kredit itu yang diumumkan oleh presiden tidak termasuk para PNS yang mendapatkan gaji tetap, Bapak ketua ini keadaan sosial di Gorontalo dan mungkin juga di daerah minus yang lain itu yang bisa mengajukan kredit di bank maupun itu ya PNS Pak. Walaupun ada orang yang kredit leasing di bank atau di leasing yang bukan PNS tetapi tetap atas nama PNS, maka Menjadi serba susah sekarang itu di tempat seperti Gorontalo dan NTT walaupun mereka nol persen covid, Tetapi efeknya sudah ada duluan gelombang ekonominya sudah termasuk sebelum gelombang korona.

Sudah perka WFH, sudah terimbas covid, covid nya belum ada imbasnya sudah masuk duluan, Keringanan kredit nya juga tidak dapat begitu lalu mereka juga didatangi oleh depkolektor walaupun OJK Sudah beberapa waktu lalu sudah mengatakan bahwa a depkolektor tidak diizinkan begitu. tetapi dapat datang juga di sana faktanya di lapangan ada mereka mengadu ke bank atau leasing tidak didengar mengadu ke apa namanya WhatsApp OJK dan juga call center nya OJK tidak ditanggapi Bapak ketua saya dan juga beberapa teman lain di sini juga ada Ibu Siti Ibu Ella dan lain-lain yang membantu mensosialisasikan OJK punya keputusan-keputusan yang secara teknis mengenai kredit.

Saya mensosialisasikan apa yang diputuskan oleh OJK pun itu dibully oleh rakyat sebagian Mereka bilang bahwa ini El Nino anggota DPR tidak mau seperti presiden yang ingin apa namanya menunda setahun cicilan harus pakai surat surat, saya bilang sama masyarakat bahwa ini OJK kami ini membantu supaya keputusan OJK ini masyarakat tahu tidak semua yang dapat penundaan cicilan. Karena kalau di penundaan cicilan itu akan blablabla gitu kan menjelaskan juga pak, akan membantu OJK kami berkoordinasi dengan humas objektif.

Tetapi yang terjadi adalah masyarakat itu berharap terutama yang ada di daerah-daerah ini itu juga mesti mendapatkan perhatian khusus dari OJK Gorontalo NTT mungkin papua dan papua barat dan lain-lain yang kehidupan sosialnya tidak sama dengan daerah Jakarta mestinya perlakuannya juga berbeda kalau misalnya disamakan dengan Jakarta maka seluruh negeri ini akan menjadi

Susah pak akan menjadi belum ada covernya di Gorontalo atau di NTT tetapi sakitnya sudah ada jangan-jangan lebih banyak orang yang mati karena dampak covid daripada karena covid itu yang kita harapkan supaya OJK bisa memberikan perhatian khusus mengenai hal itu.

Yang kedua adalah ini mengenai krisis komunikasi juga Pak ini bukan mengenai kesehatan saja bukan soal Ekonomi saja tetapi ini menjadi penting sekali miskomunikasi, Presiden memberikan kalimat bahwa seluruh cicilan ditunda setahun mestinya ada kalimat tambahan sedikit saja 1 frasa bagi yang memenuhi syarat kalau ada kalimat itu maka penjelasan OJK menjadi make sense karena tidak ada kalimat frase bagi yang memenuhi syarat itu seluruh rakyat di negeri ini mengatakan bahwa atau memahami presiden sudah menjamin 1 tahun tunda cicilan kan begitu.

Siapa pun yang mau berbeda dengan Presiden pasti itu dia tidak ingin rakyat Sejahtera, atau dia ingin menyusahkan rakyat begitu jadinya Pak, inilah yang sedang kita hadapi ini. Krisis komunikasi ini soal cicilan khususnya kita berharap OJK dan juga Bambang ataupun kewenangan lain bersama Menteri Keuangan atau jebir Presiden dan kalau perlu dengan Presiden, Jelaskan kepada rakyat bahwa begini duduk persoalannya karena kalau rakyat salah paham pak yang akan terjadi itu seperti yang ada di Gorontalo kolektornya hampir digebukin ada yang sudah digebukin ada yang sudah hampir yang mau berantem sudah mau clas.

Ini kalau keadaan seperti ini Pak covidnya belum ada berantem sudah ada, ini kan begini ini dampak-dampaknya jangan-jangan kita ini bicara untuk menangani masalah kesehatan dan juga masalah sosial masalah... ah belum nyampe tetapi yang sudah nyampe yang kita bikin sendiri adalah masalah sosial nya gara-gara pernyataan-pernyataan yang tidak sinkron antara pejabat-pejabat negara.

Mudah-mudahan bisa berkoordinasi dengan Mensesneg atau Menkominfo atau siapa lah yang ada di level pemerintahan pusat untuk menjelaskan hal-hal yang penting seperti itu kepada masyarakat.

Yang pak ketua bahwa Ini kan ada penjualan saham saham ada juga pembelian saham saham ada naik turunnya itu di Bursa Efek Indonesia kami hanya berharap bahwa jual beli saham itu tetap perhatikan kedaulatan merah putih itu saja Pak Bapak OJK pasti memahami apa yang kami maksud, dan selebihnya kami memberikan apresiasi kepada OJK dan juga lembaga-lembaga lain yang sudah berusaha untuk membantu masyarakat sekali lagi pak yang pertama jangan lupa PNS terutama di daerah-daerah minus untuk diberikan keringanan juga yang kedua komunikasi dengan Presiden supaya bisa sinkron adalah saham-saham di negara ini tetap harus diperhatikan kedaulatan Merah Putih Indonesia Raya.

Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima Pak Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem kalau masih ada pertanyaan.

F-P.NASDEM (HASBI ANSHORY, SE., MM):

Baik pak ketua dari Fraksi Nasdem kami menugaskan Pak Satori pak ketua.

F-P.NASDEM (SATORI, S.PdI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih, kami fraksi Nasdem mudah-mudahan mohon doa ini bersama mudah-mudahan kasus virus Corona ini segera berakhir karena masyarakat kita Masyarakat Indonesia apalagi dengan menghadapi virus Corona ini yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian kita juga apalagi kita menjelang bulan puasa dan Ramadan 1441 Hijriyah.

Mohon doanya mudah-mudahan kasus Corona segera berakhir, pak ketua dewan komisioner OJK yang kami hormati beserta jajaran, ketua komisi dan teman-teman kami 11 tadi sudah banyak kita sikapi hampir mayoritas yang disampaikan adalah kendala di lapangan dan situasi kondisi di masyarakat yang, hampir sama mungkin seluruh Indonesia ini.

Pada intinya Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa ada relaksasi atau keinginan dibebaskan angsuran bagi debitur yang terkena dampak covid 19, kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh OJK kepada seluruh lembaga keuangan untuk membuat aturan relaksasinya fungsi monitoring OJK bahwa relaksasi itu akan berjalan dengan baik karena lembaga keuangan dibawah pengawasan OJK sangat banyak.

Yang perlu saya tanyakan pak OJK bagaimana support OJK dalam penanganan virus Corona mengingat anggaran yang diperoleh OJK cukup banyak apakah sudah disalurkan untuk bantuan ke masyarakat atau lembaga keuangan yang membutuhkan, lalu bagaimana hasil kajian OJK terhadap pertahanan lembaga keuangan menghadapi virus Corona tersebut.

Kemudian yang kedua Berdasarkan pernyataan dari asosiasi pernyataan perusahaan Indonesia menyatakan bahwa walaupun ada kebijakan pemerintah dan OJK terkait relaksasi kebijakan angsuran bukan berarti perusahaan pembiayaan tidak melakukan penagihan Bagaimana OJK menyikapi perbedaan pendapat tersebut.

Kemudian selanjutnya Bapak ketua dewan komisioner OJK ini pembiayaan lipping ternyata diberikan kita sebagai nasabah diberikan kebijakan kelonggaran tetapi diharuskan untuk dilakukan administrasi lagi pak harus bayar administrasi lagi Kemudian kena biaya administrasi ini mohon OJK untuk menindaklanjuti bahwa leasing atau Finance yang berbuat seperti itu Pak karena memberatkan juga kepada masyarakat. kemudian ini mohon maaf juga kami hanya menyampaikan aspirasi barangkali OJK bisa mempertegas kepada Bank Pembangunan Daerah PPD PPD yang ada di daerah masing-masing saya hanya menyampaikan aspirasi, mayoritas bahkan mungkin sebagian besar anggota DPRD kabupaten kota Provinsi yang ada di daerahnya masing-masing itu mungkin terkadang terkadang ya itu begitu dilantik sk-nya diserahkan ke bank BPJS Bank Pembangunan Daerah ini mohon barangkali kepada Bank Pembangunan Daerah

juga memberikan kebijakan kepada teman-teman DPRD kabupaten kota yang ada di Bank BPD untuk diberikan keringanan juga sama Pak.

Artinya dampak daripada korona juga sama Pak teman-teman di DPRD di daerah tidak adanya kegiatan kemudian ada yang gajinya dipotong 50% itu barangkali mohon diberikan petikan Pak kepada Dirut Dirut Bank BPD untuk memberikan Kebijakan kepada teman-teman di DPRD kabupaten kota agar sama untuk diberikan keringanan dalam hal ini membayar jasanya saja lah pokoknya ditunda itu Barangkali Pak ketua dewan komisioner OJK dan pak ketua Komisi XI beserta teman-teman yang bisa saya sampaikan terima kasih, *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Keadilan PKB Pak Ibu Ela ada kalau Ibu Ela tidak ada Pak Fathan ada atau tidak ada orang PKB.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I):

Terima kasih waktunya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati pimpinan Pak ketua dan wakil ketua yang hadir rapat virtual bersama-sama dengan OJK.

Pak ketua OJK dan juga dewan komisioner lainnya beserta jajaran yang saya hormati para senior Para dewan Komisi XI yang sudah hadir Terima kasih atas izin pimpinan berkenan memberikan waktu dari pandangan saya selaku Fraksi PKB nomor anggota A 8, izin menyampaikan catatan yang sudah Ditulis ada beberapa hal yang harus disampaikan berkaitan hasil presentasi dengan OJK.

Mungkin kawan-kawan sebelumnya juga tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita pertama mudah-mudahan dengan wabah korona ini segera berakhir dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. yang mengapresiasi Sebenarnya langkah pemerintah yang tepat dalam hal ini mungkin karena diwakili OJK terkait dengan tugas dan fungsinya restrukturisasi perbankan atau jasa keuangan tetapi tetap ada beberapa catatan yang harus disampaikan dalam rangka menghadapi covid ini memang tidak mungkin mudah semuanya kena dampak bukan hanya soal ekonomi Otoritas Jasa Keuangan yang paling penting adalah soal menjamin nyawa manusia atau mengganggu aktivitas hidup manusia bahkan sampai juga mengambil nyawa manusia dan ini harus kita pikirkan, karena tema hari ini adalah di OJK pertama catatan untuk di OJK dengan adanya apalagi dengan Perpu dengan berbagai peraturan OJK yang sudah hadir yang sudah dimunculkan PKB memberi himbauan jangan sampai juga ada moral hajat atau penumpang gelap memanfaatkan situasi bank yang memang hari ini menjadi tugas masing-masing.

Sudah ada aturan di POJK tetapi kalau memang ada mental-mental yang tidak bertanggungjawab berkaitan dengan memanfaatkan situasi plafon yang

sudah jelas Siapa yang mendapatkan dan lain sebagainya Itu juga harus dijalankan dengan sesuai dengan undang-undang.

Yang mungkin perbankan juga di disampaikan Pak Satori catat ada ada administrasi tadi pagi saya menerima aduan dari masyarakat bahwa wa malah kira-kira Agak repot 1 ada penanguhannya 3 bulan tetapi harus bayar administrasi Rp500.000. Terus juga ada penambahan ada dua di kasih 2 pilihan dengan penambahan bunga sebagai bentuk administrasi. itu juga saya harap OJK bukan hanya mengawal hanya sampai Tuntas di kebijakan tetapi harus melakukan pengawasan implementasi di lapangan karena pengumuman Meskipun tidak harus datang ke bank beberapa masyarakat di daerah tidak sepenuhnya mengerti online pasti akan tetap datang ke Bank nah ini implementasi di lapangan ini juga harus betul-betul dipastikan bahwa ajuan apalagi bukan hanya restrukturisasi perbankan ada juga untuk pengurusan kur atau Ini akhirnya sangat menumpuk mekanismenya dalam perbankan.

Terus harus juga melakukan pengawasan karena beberapa bank yang sifatnya unit atau di tingkat kecamatan mungkin di Jakarta atau di beberapa kota besar bank yaitu tutup jadi akhirnya apa terjadi penumpukan Dengan tidak dibarengi fasilitas perbankan.

Jadi sampai saya menyaksikan sendiri sampai ngantri di luar kepanasan bahkan sampai 3 jam menunggu, di BRI yang sudah ada misalkan itu juga implementasi di lapangan nya harus ada di awasi perbankan perbankan yang memang punya kewajiban untuk bisa melayani masyarakat lewat mekanisme yang ada itu juga tetap harus di oleh OJK.

Mungkin itu pak ketua Sekali lagi saya mengapresiasi dengan himbuan betul betul jangan ada penumpang gelap, jalankan POJK sesuai dengan aturan, satu lagi tentang sanksi Kan di situ dituliskan bahwa sanksi yang tidak menjalankan, ini juga harus jelas rasanya seperti apa jangan sampai umum bagi para perbankan atau leasing yang tidak memenuhi atau yang tidak patuh terhadap POJK, itu juga aturannya atau juknis-nya harus jelas terkait dengan sanksi yang dikenakan terhadap perbankan atau leasing yang yang menjalankan program restrukturisasi perbankan ini.

Terimakasih pak ketua mungkin tadi dari F-PKB ada tambahan kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, untuk putaran kedua Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat silakan kalau masih ada ibu Vera Apakah masih ada yang akan bicara mewakili.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih ketua Saya sendiri akan menghilangkan pertanyaan yang sudah saya sampaikan secara tertulis, namun ini juga perlu agar teman-teman tahu mengenai pertanyaan Saya yaitu berkaitan dengan perlambatan dari kegiatan perekonomian dan dampak pandemic covid 19 ini tentunya kita tahu semua tadi

beberapa teman sudah menyampaikan adanya pengaruh secara signifikan lewat beberapa jalur yaitu jalur kinerja dan kemampuan di sektor, terutama pada UMKM dalam memenuhi kewajibannya tentunya kita harus mengetahui bagaimana perbankan dan industri keuangan non bank dan juga beberapa perubahan nilai dan Aset lembaga jasa keuangan sebagai akibat Pelemahan serta instrumen jasa keuangan dan instrumen saham Pelemahan nilai tukar dan lain-lainnya juga terkoreksi antar sektor keuangan dan pembiayaan semua ini akan pengaruhi tingkat npl dan juga likuiditas dari permodalan di lembaga jasa keuangan.

Tentunya kita ketahui tekanan likuiditas ini tidak adanya angsuran bunga untuk kredit UMKM dan KKB tadi juga disampaikan oleh OJK di perbankan sekitar kurang lebih 210 triliun dan angsuran bunga pembiayaan KKB di beberapa perusahaan pembiayaan sekitar kurang lebih 38 triliun, tentunya kita tahu kondisi aset perbankan baik BUMN dan BUMS akan dampak dari adanya penundaan tersebut sehingga rentabilitas rentabilitas dari CN pr-nya ini juga sangat mempengaruhi terhadap likuiditas selama kurun waktu adanya masalah konflik 19 dan kita tidak tahu Sampai kapan ini akan berakhir dan ini juga sangat berpengaruh terhadap likuiditas selama kurun waktu restrukturisasi kredit dan kelemahan Eco.

Yang Ingin saya tanyakan adalah memberikan dampak kepada solvabilitas keseluruhan industri perbankan tentunya OJK perlu melakukan mitigasi dan melihat seluruh indikator tingkat kesehatan perbankan baik BUMN ataupun Bank Swasta agar kebijakan yang dilaksanakan oleh OJK nanti tidak menjadi permasalahan baru baik perbankan(suara tidak terdengar) namun juga harus dilihat Bagaimana dengan moral Hazard nya ini juga berlaku tentunya kepada bank swasta namun juga bagaimana dengan bank swasta moral Hazard nya yang menjadi persoalan pada saat ini kita tahu juga tidak melihat buku 3 dan buku 4 tetapi seluruh perbankan Apabila mereka likuiditas nya itu mereka mempunyai aset dan misalnya ada 7000 triliun dari bank-bank besar(suara tidak jelas) sehingga mereka harus mengembalikan harus menerima net interest margin nya tidak ada perputaran dan ini terjadi restrukturisasi secara satu tahun di bulan ke-13 bagaimana mereka bisa mengantisipasi sementara 1-12 bulan mereka terhenti. Nah ini harus dilakukan mitigasi terkait dengan masalah Perpu dan aturan bawahannya sehingga ketika ini terjadi apakah ini Berlin atau Bell out kami tidak tahu tentunya ini kebijakan dari OJK.

Kita hanya melihat bagaimana dilakukan oleh OJK(suara tidak jelas) selama 12 bulan ini juga kurang jelas mekanismenya seperti apa namun pertanyaan saya adalah ketika nanti Bank Bank ini terjadi gagal bayar bank buku 1 sampai buku 4 misalnya mereka menjadi gagal bayar Apa langkah-langkah yang dilakukan apakah ini LPS yang akan menangani sehingga LPS sudah mulai melakukan adjusment meminta adjusment, Di atas 2 miliar.

Ini uangnya dari mana Apakah harus tetap melakukan SBN sementara kita tidak tahu dan juga tidak ada yang mau beli pada saat ini, Saya ingin mendapat penjelasan langkah-langkah ke produk turunan yang yang akan oleh pemerintah terkait mengenai Perpu dan turunannya Apabila terjadi kegagalan terhadap Bank Swasta kalau BUMN kita tahu semua akan di cover oleh pemerintah namun jika Bank Swasta Bagaimana jaminan masyarakat terhadap uang yang mereka himpun diatas 2 miliar saya berterima kasih, akan meminta adjusmenet tersebut Namun aturan turunan dari PP itu juga itu juga harus kita dapatkan dari OJK jadi komisioner

OJK jangan hanya melihat UMKM nya saja tetapi berdampak seluruh koperasi tidak ada satupun satu industri yang saat ini bisa berjalan dengan lancar.

Kasus 2008 itu hanya terkait masalah(suara tidak jelas).... kasus ini linier prorata dari atas sampai bawah dari tingkat mikro Ultra mikro sampai tingkat atas ini harus hati-hati saya mendengar ada beberapa bank yang mulai bengkak-bengkak bank swasta yang terbesar yang melakukan penelusuran kredit konsumen Itu sudah mulai melakukan aja adjustment ini bagaimana diskresi yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh perbankan melalui Perpu dan mereka memberikan keleluasaan penuh ini juga berat (suara tidak jelas) bagaimana juga dengan perbankan sebelum kasus covid ini juga kita minta kepastian ya terhadap Bank Muamalat dan lain-lainnya mereka juga menunggu ini adalah momentum yang luar biasa bagi mereka tidak usah lagi menunggu ternyata kalau covid ini sudah ada di depan mata sehingga mereka berbondong-bondong meminta pemerintah untuk melakukan bailout ini bahaya.

Saya ingin mendapatkan...(suara tidak jelas)... secara keseluruhan ketika ada seluruh bank buku 1 sampai buku 4 dari setiap perbankan terjadi sistemik gagal bayar ini membahayakan buat kita semua antisipasi yang dilakukan OJK dan produk turunannya terkait masalah Perpu Jangan hanya melakukan kan(suara tidak jelas) namun yang besar-besar juga harus dipikirkan bukan yang kecil-kecil saja tidak ada satupun usaha yang sekarang ini jalan ritel Hotel jasa penerbangan pabrik itu sudah banyak di Dapil saja melakukan off di Karawang dan ini juga mereka menunggu sampai kapan kepastian dan mulai usaha yang paling kecil juga sudah di rumah kan Bagaimana yang besar-besar, sehingga ini juga berpengaruh kepada aturan-aturan karena tidak ada 1 Saya yakin beberapa perusahaan-perusahaan besar masih juga meminjam kepada perbankan.

Jadi Saya minta nanti dijelaskan secara tertulis, atau disampaikan secara highlight mengenai kasus yang akan terjadi apabila terjadi gagal sistemik Terima kasih pimpinan ketua OJK beserta jajarannya.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat dari PKS Apakah putaran kedua masih ada.

F-PKS (Ir. H. JUNAIDI AULY., MM):

Masih ada ketua Terima kasih ketua, kesempatan kedua yang akan menyampaikan Pak Hidayatullah silakan Pak Hidayatullah.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Hidayatullah Hidayatullah, tidak Ada Pak Hidayatullah.

F-PKS (Ir. H. JUNAIDI AULY, MM):

Kalau tidak ada Bu Anis, Bu Anis mungkin stand by.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Hidayatullah ada Pak Hidayatullah silakan. Kan

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Komisi XI Dan rekan-rekan anggota Komisi XI.

Pak wimboh ketua OJK dan seluruh komisioner yang hadir.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, bahwa kita tanpa kita kehendaki kita sudah masuk dalam kondisi awal gangguan terhadap industri keuangan kita, dan tentu di awal ini kita harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif bagaimana agar guncangan yang terjadi (Suara tidak terdengar). Kita berharap untuk guncangan guncangan yang terjadi di industri dapat kita tangani dengan langkah yang efektif dan efisien belajar dari sejarah ketika kita terjadi masalah keuangan kita, ternyata meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai sampai sekarang, seperti BLBI misalnya, terkait dengan situasi industri keuangan kita oleh karena itu kami meminta kepada OJK kalau seandainya sudah dilakukan stress test terkait industri industri keuangan kita terutama perbankan untuk masing-masing buku 1, 2, 3 termasuk DPR agar segera bisa diberikan kepada Komisi XI, kalau belum kami menyarankan agar segera dilakukan stress test yang dilakukan secara berkala sehingga kita mendapatkan akurasi data yang yang dapat digunakan dengan efektif untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang timbul.

Terkait dengan itu kami juga ingin menginginkan informasi terkait dana pihak ketiga yang ada di dunia perbankan di industri perbankan sekarang giro, tabungan, deposito, deposito on call, ingin mendapatkan angka-angka itu kemudian apakah saat ini sudah mulai ada pergerakan penarikan dana terutama dari nasabah-nasabah besar karena kita hanya menjamin maksimal 2 miliar kami perlu mendapatkan info ini sekaligus menyarankan kepada OJK untuk melakukan ... usaha besar yang memiliki dana-dana besar di perbankan agar bisa dapat membantu kondisi saat ini, justru tidak dengan melakukan reaksi panik dengan menarik secara besar-besaran. Tentu ini kami harapkan kepiawaian OJK untuk meyakinkan semua pihak kita bersama-sama dapat mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul dari akibat covid 19.

Kemudian yang berikutnya belum mendapatkan protokol krisis seperti apa yang akan yang ada dalam benak OJK yang akan diusulkan kepada SSK karena dengan begitu kami memudahkan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan dunia perbankan yang akan berkomunikasi kepada kami sebagai wakilnya. Apakah misalnya dalam protokol krisis itu mana yang lebih diprioritaskan, Apakah Bail in atau Bailout.

Kemudian terkait dengan bank syariah, di bank syariah itu kan ada mekanisme keseimbangan ketika pendapatan bank menurun maka otomatis bagi hasil yang diperoleh oleh pemilik dana pihak ketiga juga akan menurun secara proporsional. Apakah dalam katakanlah 2 bulan terakhir ini atau 3 bulan terakhir sejak Januari, mekanisme itu sudah berjalan bagaimana kecenderungannya bagi hasil di perbankan syariah apakah trennya stabil atau ada tren menurun untuk bagi

hasil, kerugian kami terakhir menyarankan terkait dengan cara penanganan yang pemerintah sudah menyiapkan bantuan untuk kebijakan-kebijakan dan kemungkinan bantuan keuangan bagi pihak yang terkait di dunia perbankan misalnya untuk nasabah peminjam sudah ada kebijakan-kebijakan relaksasi. Kemudian untuk dunia perbankan sudah dilakukan pelonggaran kriteria-kriteria indikator kesehatan perbankan, bagaimana dengan persamaan dari nasabah dana pihak ketiga.

Apakah ada kemungkinan kebijakan agar bisa bersama-sama menghadapi problem ini dengan penurunan tingkat suku bunga tabungan deposito misalnya, sehingga yang merasakan beratnya problem ini hanya (rekaman terputus suara tidak terdengar).

Saya kira itu beberapa pertanyaan yang kami sampaikan terima kasih pak ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan putaran kedua ini dari Fraksi PAN siapa yang akan diberikan kesempatan untuk pendalaman Pak Jon kapoksi.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI.

Pak wimboh dan segenap jajaran dan yang mendampingi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk yang kedua ini Pak Johan berhalangan jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, hal yang menarik kita ini setiap ada masalah undang-undang yang kotak katik setiap ada short full kita rubah undang-undang ada urusan apa rubah undang-undang ke belakangan ini undang-undang ada rencana omnibus Law, kemudian hari ini juga merubah undang-undang yang belum lama kita buat juga artinya undang-undang berkaitan dengan protokol krisis, sebenarnya pertanyaan pak Hidayatullah tadi sudah ada protokol krisisnya Pak ini mau dirubah lagi dengan Perpu yang ada tapi itu semua untuk menjadi perhatian kita bersama undang-undang yang kita bikin dengan sangat hati-hati yang harapnya itu berjangka waktu panjang tetapi banyak yang ... (suara tidak jelas).... mendadak itu satu poin.

Kemudian perubahan-perubahan itu tentunya ini yang ada kondisi yang abnormal kita pahami cuman perubahan peraturan atau undang-undang yang dilakukan ini betul-betul harus memperhatikan segala sesuatu, saya yang ingin menyampaikan misalnya apa yang dilakukan OJK dengan relaksasi itu di satu sisi sangat baik dan penting untuk dikatakan begitu juga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, LPS dan seterusnya tetapi sisi yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang adalah sisi membantu masyarakat itu point yang paling penting memang, tetapi kita belum memperhitungkan sisi yang akan membantu ini let say, kita bicara perbankan kemudian lembaga lainnya mereka ini dalam menghadapi keputusan-keputusan berperan serta membantu kesulitan

masyarakat ini pasti akan terjadi sesuatu terhadap company-company yang mendukung ini, mendukung kebijakan ini.

Itu apa yang direncanakan apa back upnya nanti apabila ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan artinya tadi minta cicilan mungkin digratiskan kemudian minta keringanan berbagai sisi, ujungnya ini harapannya kan pasti pemerintah turun tangan, pemerintah turun tangan kemudian usulan pemerintah itu adalah defisit budget 5% seperti yang disampaikan kemarin Nah ini harus ada kalkulasi berapa besar kita harus membantu kondisi seperti ini sesuai kemampuan yang ada, semua memang harus kita bantu saya punya pemikiran bantuannya itu tidak harus langsung berbentuk gratis atau bantuan itu berbentuk langsung pertolongan, sehingga lebih kepada merestrukturisasi kewajiban yang ada pada saat kondisi abnormal.

Kemudian itu sampai titik kondisi yang normal itu diakumulasi dan dibagi secara proporsional di tahun-tahun yang akan datang, beberapa kebijakan saya mau menyampaikan ini misalnya soal bursa kemarin ada kebijakan dari Meneg BUMN agar perusahaan-perusahaan BUMN buyback membeli kembali saham saham yang ada di market sebagaimana kita ketahui saham yang ada BMN yang turun, IPO pada itu diberi insentif oleh pemerintah yaitu mereka hanya membayar PPH badan 10% dari 25%. Apabila mereka IPO dalam jumlah 40% saham, kalau mereka menjual saham di market mereka 40% besok mereka membeli kembali aja 2%. Artinya mereka di pasar tinggal 38% sehingga mereka harus membayar PPH badan 2020 ini 25 persen.

Kenaikan itu itu jauh lebih besar dibandingkan walaupun harga saham normal kembali kebijakan ini saya juga direspon oleh OJK dengan sangat cepat tetapi saya belum lihat apa kebijakan terhadap insentif yang diberikan ini kebijakan-kebijakan yang diambil dalam kondisi, halo bisa dengar kah, kebijakan seperti ini kemudian itu satu poin, kedua kemudian kita juga melihat SBN ini kan pemerintah turun di market ini, jangan sampai terjadi crowd efek pak Wimboh artinya ada persaingan nanti antara pemerintah dengan swasta yang mau survei juga ini akan meningkatkan harga di pasar yang gila-gilaan.

Point ketiga implementasi terhadap yang disampaikan relaksasi oleh OJK tersebut sampai hari ini masih jauh dari harapan pak, tetapi kami paham bahwa itu perlu waktu tepat waktunya tidak bisa terlalu lama, kemudian hal yang penting lagi Pak kemarin disampaikan oleh Sri Mulyani ada backup atau rencana untuk membuat usaha berjalan baik dicadangkan 150 triliun mereka atau KKSK akan membahas ini dalam kondisi dalam waktu yang tidak terlalu lama saya meminta kalau bisa OJK berperan banyak dalam hal ini karena idenya dari teman-teman keuangan 150 miliar itu bisa berbentuk investasi bisa berbentuk pinjaman bisa berbentuk jaga penanaman modal, ini ini yang dilakukan.

Kalau seperti ini kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan itu perlu termasuk di mana dia ini mumpung belum dibahas detail oleh KKSK, kemudian sebenarnya tadi saya menunggu-nunggu Pak Wimboh apa yang ditanyakan oleh teman-teman dari kemarin juga sebenarnya harus disampaikan stress test terakhir pak, dari sisi itulah kita bisa bergerak ke depan nanti akan seperti apa jadi asumsi yang dipakai oleh pemerintah dalam konteks KKSK kondisi stress test yang dilakukan terakhir seperti apa kemudian ke depan akan seperti apa. Oleh karena itu stress test ini perlu diinfo ke kita pak, terakhir dilakukan kapan dan ekspektasi kedepan akan seperti apa itu saja dari saya terima kasih pimpinan

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak John Saya kira sudah cukup dari Fraksi ketiga anggotanya 1 jadi kalau kita sepakati ada baiknya kita mendengarkan jawaban dari OJK dulu apabila.

Sebentar Pak Mustafa jadi kita dengarkan dulu dari OJK untuk memberikan jawaban apabila nanti masih ada waktu kalau masih ada waktu kalau Sudah pendalaman kita putar lagi perfraksi tetapi kita dengarkan dulu sekarang jawaban dari OJK pak Wimboh untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sebuah saya diwakili oleh dua orang per Fraksi baik waktu kami persilahkan Pak Wimboh.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Iya terima kasih Bapak ketua dan seluruh pimpinan serta anggota Komisi XI yang kami hormati Kami lihat ada pertanyaan terjadi masing-masing fraksi ada 9 X 2 ada 1817 pertanyaan yang masing-masing itu lebih dari 1 kami mohon izin untuk kami jawab secara umum dulu mudah-mudahan tadi ada beberapa pertanyaan yang juga sangat berhubungan dan juga kami mohon izin nanti untuk ADK yang relatif untuk memberikan penjelasan lebih detail izin.

Demikian Bapak pimpinan, akan kami mulai dulu bahwa kalau ini yang stimulus yang telah kami lakukan tidak kita lakukan ini tidak bisa kita hindari bahwa sektor riil yang mempunyai pinjaman ke bank dan lembaga keuangan itu jelas mengalami kesulitan. Kalau tidak ada kebijakan kita ini kesulitan dan tentunya akan secara umum bank-bank akan seperti bisnis normal menyelamatkan dirinya sendiri menagih dengan depkolektor yang lebih banyak agar jaminannya terus bisa disita, dan akhirnya menjadi tidak terkoordinasi. Ini tidak kita inginkan dan juga lembaga keuangan tidak ada insentif untuk melakukan restructuring karena restructuring adalah biasa akan tetap dibentuk PPAP dan akhirnya meng*hit* permodalan, nah tidak kita inginkan.

Nah sehingga kita preventif oke dengan direction OJK bersama dengan pemerintah Ini kita lakukankita tahu bahwa memang ini perlu komunikasi dan penjelasan yang sangat detail baik kepada masyarakat dan baik kepada lembaga keuangan diri sendiri, untuk lembaga keuangan sudah kami lakukan seluruh pengurus nya dan juga kita minta seluruh jajarannya termasuk didaerah untuk dikomunikasikan segera dan untuk membantu dikomunikasikan kepada masyarakat, dan kita tahu memang betul ini masyarakat mendengar lebih dulu terutama di daerah statement-statement terutama Pak Presiden dan ini berbagai pihak, ini lebih dulu daripada penjelasan penjelasan detail ini kita akui.

Namun demikian sekarang sudah kita lakukan secara detail juklak-juklak sudah ada dan semuanya sudah membuat platform dan memang kami tetap jaga kalau ada hal-hal yang mungkin 1-2 masyarakat masih perlu penjelasan. Itu adalah yang kita akui bahwa ada beberapa yang tentunya di lapangan perlu kita terus-menerus kita lakukan sosialisasi dan tadi menyinggung juga kita punya call center 157 yang di bawah pak Tirta, ini dengan saja selain itu kita juga terbuka lebar semua pejabat untuk menjadi agen komunikator kita, bisa dihubungi anytime oleh masyarakat. Saya sendiri juga membuka diri di hubungi siapa saja, itu adalah (rekaman tidak terdengar/suara tidak terdengar) jadi protokol dengan pemerintah ini kalau diperlukan tadi dana untuk mengembalikan kembali fungsi dari ekonomi,

ini dapat kami sampaikan yang kami lakukan, kita tahu bahwa ini pendapatan bunganya turun, lembaga keuangan dan bank ini, tinggal likuiditasnya bisa terganggu ya, sejauh mana tentunya tergantung dari pada *bafer* masing-masing lembaga keuangan, berarti yang kuat bank yang kuat barangkali tidak ada masalah tetapi yang tipis platformer ini mungkin saja ada masalah dan gangguan.

Apabila ada yang kita optimalkan adalah (suara tidak terdengar) yang kita minta dan lembaga pembagian itu hampir semua mempunyai pinjaman dari bank coba kita minta mempropose ke Bank-nya untuk di restruktur sama ya. Disamping itu kalau itu ada Bank tadi call money kalau apabila pinjaman antar bank sudah tidak bisa silahkan melakukan pinjaman likuiditas Bank Indonesia yang tadi ruangnya dalam perpu sudah ditentukan, mudah-mudahan tidak sampai begitu karena Indonesia sekarang sudah memberikan kelonggaran yang itu likuiditas di pasar cukup besar artinya beberapa bank mempunyai kekuatan untuk meminjamkan kepada bank lain yang nanti yang kita jaga adalah agar tidak terjadi segmentasi artinya tidak ada bank yang memerlukan entitas pinjaman dari antar bank itu tidak dapat.

Ini yang harus kita jaga nanti bersama Pak Heru ini yang akan kita jaga supaya tidak terjadi segmentasi, yang Bahaya adalah duitnya ada tetapi ada yang pinjam tidak dikasih inilah yang sehingga kita yakin kan tidak begitu, itu itu jalan otomatis (*suara tidak jelas*) Bank Indonesia tidak diperlukan Tetapi kalau kalau itu tidak jalan dan juga bahkan bank yang biasanya juga tetapi itu kondisinya barangkali sudah mulai sangat berat yang biasanya jadi di interbank call money ternyata kesulitan itu hanya terjadi kalau terjadi kalau ketidakpercayaan masyarakat akan terjadi.

Tetapi kalau kita jaga tidak terjadi ras atau terjadi atau tidak terjadi turunnya kepercayaan Kami yakin secara overall likuiditasnya cukup kita jaga. inilah yang terutama bersama-sama Bank Indonesia dan kementerian keuangan untuk menjaga agar likuiditas di sistem itu cukup jadi Market nya cukup kalau Market nya cukup kita jaga jangan sampai terjadi segmentasi dan itu juga hanya bisa terjadi kalau nilai tukarnya betul-betul dijaga tidak menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Itu yang kemarin juga sudah kita bicarakan dan ini hanya bisa kalau juga nanti kalau diperlukan dengan LPS bagaimana menjaga kepercayaan ini deposit barangkali perlu coverage nya perlu kita tingkatkan.

Itu semua adalah sebuah skenario yang kami siapkan lantas untuk monitoring individual lembaga keuangan termasuk bank dan lembaga keuangan nonbank ini penting itu yang kami bersama Pak Heru Paris dan Pak Husein dan tentunya seluruh dewan komisioner akan kita jaga betul agar kita tahu angkanya bahkan sekarang sudah kita minta seluruh lembaga keuangan monitor likuiditasnya dampak karena tadi para nasabahnya memang meminta restrukturisasi sebagian besar ini kayak apa potrenya akhir bulan akan kita lihat dan kami nanti akan kami laporkan secara khusus dan tertutup kepada Komisi XI kondisinya, dan sekarang ini yang kami lakukan hanya angka (*suara tidak jelas*) saja pendapatan bunga sampai dengan 10 bulan kedepan sampai Desember untuk perbankan itu 210 triliun pendapatan bunga sehingga juga harga itu disitu 193 triliun kendaraan bermotor 17 triliun jadi total yang termasuk lembaga keuangan di lembaga keuangan sendiri perusahaan pembiayaan itu 37,9 triliun.

Asumsinya asumsi kalau kalau itu 50% saja sudah kita hitung jadi 50% dari total likuiditas 248,2 triliun berarti sekitar 124 triliun kalau 50% nah ini kita lihat harus

likuiditas di sektor keuangan ini harus cukup untuk itu itu yang harus kami selalu diskusikan dengan Bank Indonesia dan kementerian keuangan dan ini Pak rief dan Pak Heru secara detail akan dimonitor setiap bulannya.

Bagaimana mekanismenya dengan pemerintah kami menyambut baik tadi di berbagai komentar bahwa Apakah UMKM itu tidak langsung dibebaskan saja bunganya atau diberi keringanan 50% sekenario setengah itu ini kami yang jelas yang sudah komitmen adalah kur karena program pemerintah adalah bantuan keringanan(*suara tidak jelas*)

Untuk UMKM ini sedang kami bahas dengan pemerintah skemanya apa apa ini untuk UMKM ini bantuan UMKM ini kami tentunya kami nanti bersama pemerintah dalam PP akan jelas skemanya Bagaimana lantas bagaimana tadi juga ada pertanyaan Bagaimana yang kita pikirkan kok sektor riil nya lembaganya bagaimana, tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau lembaga keuangan non bank ini kalau nanti ada perlu suntikan tentu ini bisa kita minta untuk mengajukan restructuring kepada bank peminjamnya pemberi pinjaman restructuring itu yang kami minta dan juga kalau perbankan likuiditasnya itu tadi interbank call money jadi itu yang sudah kita pikirkan.

Apakah nanti ada penanaman pemerintah melalui ini untuk kita kita lakukan mudah-mudahan tidak sampai ya mudah-mudahan tidak sampai apabila nanti kita lihat bahwa nanti beberapa bulan ke depan tentunya bisa kita lihat lebih detail tetapi ruang itu ada apakah ada kalau memang perlu diperlukan dalam kondisi *worst* ya mungkin perlu investor, investor itu bisa swasta tidak usah harus pemerintah tentunya merger itu bukan berarti harus menggunakan suntikan dana pemerintah bisa kita *explore* adalah merger kalau memang perlu suntikan dana memang kami bisa undang dari swasta itu adalah garis besar skenario skenario yang dapat kami sampaikan tadi kami garis bawahi kami nanti tentunya melakukan *stress test* yang akan kami siapkan, akan kami sampaikan.

Lantas berkaitan dengan bagaimana *governmentnya* tadi disampaikan jangan terjadi moral Hazard Jadi terjadi apakah yang sekarang lembaga yang mengalami proses penyehatan atau proses diakuisisi ini akan menjadi yang sebenarnya proses yang ada ini tetap akan dilakukan sebagaimana skema yang sudah kami lakukan dan tentunya nanti kami mudah-mudahan tidak ada masalah apabila ada hal-hal yang karena justru bank ini sebenarnya mungkin semuanya sudah pembicaraannya sudah lama tinggal eksekusi, Tadi barangkali bisa lebih detail pak Heru dan atau Fares dalam yang berkaitan dengan hal tersebut.

Maka nanti di protokol itu ada PP ada POJK dan tentunya ada surat edaran yang kami terbitkan lantas kami komik di berbagai tempat juga pada saat berdiskusi kita sepakat antara Menteri Keuangan kita OJK dan Bank Indonesia dan LPS bahwa kita akan menghindari adanya kemungkinan kemungkinan moral Hazard dan tentunya kita akan melakukan ini melalui program diskusi dan (*suara tidak jelas*) kita bisa check and balance lantas tadi berkaitan dengan sektor sektor yang ini itu adalah sektornya nya (*suara tidak jelas*). Sektor yang tadi kita perkirakan berdampak langsung untuk pariwisata transportasi termasuk Hotel termasuk restoran ini sekarang sudah *blended* kepada beberapa industri kita juga menyadari ada beberapa industri yang justru terutama adalah industri alat-alat kesehatan ini justru sekarang menjadi bom atau alat kesehatan yang relatif jadi tidak semua sektor itu betul-betul karena ada sektor-sektor yang (*suara tidak jelas*) yang

terutama perusahaan tekstil harus menyediakan beberapa alat itu luar biasa dan itu Indonesia dalam produksi terbesar di dunia.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian,

Kami juga kita sadari bahwa tadi ada beberapa lembaga keuangan yang menaikkan suku bunga atau menutup lain kreditnya nanti akan kami tentunya itu dimonitor oleh Pak Heru dan Pak Reza kalau ada tentunya kalau ada akan kita lihat seberapa isinya apa padahal sebenarnya kita harapkan dalam kondisi begini agar jangan memberikan terutama tadi oleh Bu Indah dan atau Bapak Ibu sekalian konsen juga hal yang sama terutama untuk proyek-proyek yang jumlahnya selama ini Justru prioritaskan untuk penanganan kesehatan.

Mengenai Indosurya Kita paham dan kebetulan Indosurya ini dalam operasi namun ini juga bisa steel over ke beberapa ini barangkali nanti ini akan kami diskusikan dengan kementerian apa koperasi yang tentunya nanti (*suara tidak jelas*) kita paham indosurya ini bisa banyak ya masyarakat kecil yang menyimpan disitu dan tentunya ini bisa menimbulkan distorsi dalam sistem keuangan juga nanti akan kami diskusikan secara detail dengan Kementerian Koperasi.

Lantas berkaitan dengan buyback tadi buyback ini Sebenarnya diharapkan sebagai (*suara tidak jelas*) kami angkanya kami rencana buyback itu rencana ada 17 triliun, 17,3 triliun dari BUMN 12 non BUMN 4,9 ini Rencananya Pak tetapi nilainya yang dilakukan masih sedikit hanya BUMN Belum banyak sebenarnya kami akan cek tetapi ini semua hanya untuk (*suara tidak jelas*) sebenarnya dan tidak mesti harus dilakukan kan dan ini (*suara tidak jelas*) ini memberikan sentimen positif pada pasar modal lantas mengenai tarif PPH badan Kalau tidak salah sudah di address secara khusus dalam Perpu dan tentunya nanti dalam tindak lanjut dalam PP bahwa inventif untuk refluks di 40% itu apabila melakukan buyback itu sudah ah bisa diakomodasi bahwa tetap diberikan insentif.

Mungkin itu beberapa hal yang penting kami sampaikan sosialisasi tetap harus kami lakukan dan juga kami melihat memang di lapangan (*suara tidak jelas*) masih ada tetapi terus kami tackle secara cepat dan komunikasikan baik kepada lembaganya dan juga kepada masyarakat melalui kehumasan kita agar masyarakat tidak bingung dan tidak jelas Bagaimana kebijakan kita dan bagaimana(*suara tidak jelas*).

Pimpinan mohon izin kami mengundang Pak Heru Pak Aris dan Pak Husein untuk menambahkan beberapa pertanyaan tadi yang lebih detail mohon izin pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Heru lanjut saja setelah Pak Heru Pak Ris silakan.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (HERU KRISTIYANA):

Terima kasih Pak Dito

Yang saya hormati Pimpinan Komisi XI.

Bapak Ibu Komisi XI yang kami muliakan.

Saya ingin menambahkan beberapa hal Pak tadi rasanya pak Ketua OJK sudah lengkap hampir menjawab semua pertanyaan tadi Kalau saya perhatikan sebagian besar pertanyaan adalah POJK, mengenai stimulus kita bagaimana kita mensosialisasikan. Apakah itu berlaku untuk semua sektor Bagaimana kemudian menghindari terkait dengan abuse maupun moral Hazard nya, saya ingin menambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum POJK ini keluar Tahun 2020 kami di OJK memikirkannya panjang lebar artinya begitu POJK ini keluar harus bisa dipakai oleh semua segmen yang terdampak covid 19 (*suara tidak jelas*).

Jadi tidak hanya terbatas kepada yang kecil-kecil tetapi juga lintas sektor termasuk yang sedang dan besar karena kita menyadari bahwa ini kita belum tahu sampai kapan selesainya juga datanya pasti tidak hanya akan kecil, dan juga tadi ada pertanyaan bagaimana nanti dampaknya kepada industri jasa keuangan kita dalam hal ini dalam industri jasa keuangan non bank kita juga memikirkan Bapak Ibu sekalian makanya di dalam memandang atau mengeluarkan POJK ke-11 ini kami harus memandangnya secara

Artinya sektor riilnya terbantu dan kemudian bank atau industri jasa keuangan nya tidak mati, Tadi Bapak Ibu sekalian dari semua pertanyaannya saya mendapat kesimpulan bahwa Bapak Ibu anggota Komisi XI sudah memandangnya seperti itu saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sekali karena memang benar, di dalam POJK ke-11 itu sektor sektor UMKM sektor kredit kredit kecil maupun kredit lain bisa memanfaatkan OJK 11 ini kami ini memberikan keleluasaan penuh sebenarnya kepada bank kepada sektor jasa keuangan Untuk memanfaatkan ini dengan skemanya ke depan karena kondisi Bank maupun kondisi debitur nya itu tidak sama antara satu bank dengan bank lain antara debitur satu dengan debitur yang lain sehingga kita memberikan keleluasaan kepada kan untuk mengambil skemanya. Apakah itu akan menurunkan suku bunganya apakah akan membebaskan atautah akan memperpanjang jangka waktu kredit nya silakan bank mengakses masing-masing (*suara tidak jelas*)

Tetapi kami menekankan memang yang mendapatkan prioritas adalah tentunya debitur debitur atau nasabah yang terdampak covid, dalam hal ini kami persilahkan kalau kreditnya diberikan sebelum haid lancar kemudian ada perkembangan covid, nasabahnya kemudian tidak bisa membayar itu bisa masuk ke dalam restrukturisasi apalagi yang diberikan setelah Februari dan betul-betul terdampak covid, itu pasti akan diberikan relaksasi pada bank.

Itu pasti akan diberikan relaksasi kepada kita, kami melakukan secara terus menerus pada sosialisasi asosiasi baik itu himbara baik itu Perbanas baik itu perbina baik itu (*suara tidak jelas*) maupun(*suara tidak jelas*).

Kami terus mengatakan bahwa silakan anda mengambil skemanya dengan melihat kemampuan nya diri sendiri sampai seberapa jauh supaya cash flow nya tidak terdampak itu saya tekan kan supaya cash flow nya tidak terganggu sehingga sektornya terbantu barangnya juga tidak sakit.

Tadi ada pertanyaan bagus sekali bagaimana nanti kalau Banknya menjadi demam, itu kita juga sudah mengkomunikasikannya kepada Bi maupun LPS dan kemenpu, skema-skema apa yang bisa dilakukan kalau terjadi seperti itu kami minta seluruh bank untuk Melakukan asesmen sendiri proaktif misalnya 10% dari nasabah yang terdampak dan tidak bayar seperti apa cash flow nya 20% 30%

sampai dengan yang paling buruk, saya minta semua bank melakukan asesmen secara seperti itu supaya nanti OJK juga bisa mengantisipasi kondisi cash flow atau likuiditas dari perbankan kita kalau kita sudah melakukan asesmen paling (*suara tidak jelas*) dan kami melihat dan mereka melaporkan setiap saat melakukan hal itu, dan saya bergembira Bank sudah Melakukan asesmen seperti itu dan dilaporkan kepada kita.

Bagaimana kita menghindari moral Hazard Bapak Ibu sekalian Saya berterima kasih ada pertanyaan tadi OJK belajar dari pengalaman(*suara tidak jelas*) 2008 tentunya kita akan menjaga kredibilitas pertama kepada pengawas saya untuk tidak abuse memanfaatkan POJK 11, jadi artinya kalau ini sudah demam jam sebelum covid, saya mengatakan tidak usah dibantu kita akan mencarikan jalan lain ini POJK ini dimaksudkan untuk yang betul-betul terdampak, jangan sampai ada moral Hazard digunakan oleh industri-industri yang ingin berlindung di dalam POJK 11.

Kebetulan kita saya bersyukur bahwa OJK sudah mempunyai tools mengawasi secara offline disaat kita tidak bisa konsen ke bank, bank sudah bisa Kita minta(*suara tidak jelas*). Seluruh datanya termasuk permintaan kredit baru dalam repository bank. setelah Bank menetapkan kata di repository pengawas bisa menarik data nya dan kita analisa, jadi kredit-kredit baru pun sudah kita cek tanpa kita datang ke bank itu sudah kita lakukan seperti itu dan sudah berjalan dan ini juga nanti akan terus kita perluasan sampai kepada BPR, Itu bisa menjadi tools kita disaat kita kerja dari rumah itu untuk menjaga juga credibility maupun untuk mengurangi dampak dari moral Hazard maupun bank-bank yang berlindung terhadap POJK ke-11 ini.

Bapak Ibu pimpinan Komisi XI dan anggota Komisi XI yang saya muliakan.

Sosialisasi masih terus kita lakukan, Saya juga selalu menekankan kepada semua industri perbankan kita untuk memandang POJK ke-11 itu secara Balance Artinya mereka membantu sektor riil nya supaya tetap hidup tetapi Bank nya jangan jangan sampai sakit, itu yang selalu saya tekankan kepada ada mereka.

Terkait dengan perintah tertulis tadi Pak wimboh sudah menyampaikan secara cara(*suara tidak jelas*) bahwa Itu pisau yang kita akan secara tajam tetapi kita gunakan. Bila perlu tujuannya adalah supaya bank-bank yang demam tidak nularin kepada bank yang lain di dalam situasi seperti ini Kami menganggap bahwa bank yang sehat juga bisa menjadi demam kalau kita melakukan pengawasan dengan standar biasa dengan prosedur biasa yang konvensional itu tentunya terlalu lama sehingga kita ingin suka bank yang yang demam di awal karena covid, tidak mau lari seperti virus ini kepada bank lain makanya kita ambil percepatan dengan perintah tertulis seperti itu, tetapi itu tentunya kami semua di OJK tidak mengharapkan itu terjadi.

Tetapi kalau itu terjadi kita sudah punya alatnya yang sudah kita akan dan moga-moga kita juga akan menjaga tidak ada penumpang gelap nya karena kita sudah menyadari dampak yang luar biasa di krisis 98 dan krisis 2008 ada moral hazard ada penumpang gelap dan ini kita tidak mau terjadi.

Sehingga tadi Pak Andreas mengatakan Bagaimana yang sudah demam sudah kita selesaikan sama kita kita tidak akan mengakomodasi yang memanfaatkan situasi seperti ini jadi saya berkomitmen (*suara tidak jelas*) juga

sama seperti itu LPS maupun di OJK dan Kemenkum berkomitmen untuk menjaga moral Hazard nya untuk menjaga supaya tidak ada (*suara tidak jelas*).

Bapak Ibu sekalian barangkali sementara dari saya seperti itu, terima kasih sekali.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Ris silahkan.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Bapak ketua Komisi XI.

Dan juga bapak ibu Anggota Komisi XI yang terhormat.

Ketua OJK dan rekan-rekan selamat sore.

Jadi kami mencoba untuk menambahkan pak ketua dan bapak bapak ibu anggota khususnya dari rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang kami tangkap pada diskusi kita hari ini khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di IKNP yaitu perusahaan pembiayaan, jadi memang betul tadi yang disampaikan Ibu Putri bahwa memang perlu sosialisasi yang betul supaya salah persepsi.

Pada waktu itu betul-betul ada situasi bahwa yang mendapat kesempatan untuk melakukan restrukturisasi adalah mereka yang kena covid, berita ini sudah diralat jadi yang betul yang dapat melakukan restrukturisasi yaitu mereka mereka yang usahanya, penghasilannya berdampak karena virus kovit 19 ini kami dengan perusahaan pembiayaan dan asosiasi sudah melakukan koordinasi sejak mulai(*suara tidak jelas*) itu diberikan kan dan perusahaan pembiayaan yang sekarang berjumlah 183 perusahaan pembiayaan sudah memberikan komitmen untuk melakukan restrukturisasi.

Laporan restrukturisasi yang disampaikan yang telah disampaikan oleh pak ketua OJK memang harus ada permohonan dari debitur yang bersangkutan dan juga mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka ini adalah debitur yang sah Hal ini tentu dibuktikan dengan perjanjian pembiayaannya kemudian juga perjanjian peningkatan jaminannya dan tentu juga yang terpenting adalah bahwa jaminannya masih di tangan mereka.

Kemudian nanti pola-pola restrukturisasi nya yang di perbankan juga sebetulnya kami telah menerima kesempatan di perusahaan perusahaan pembiayaan ini melakukan pola-pola restrukturisasi yang sesuai dengan masing-masing kondisi. kondisi ini bukan hanya kondisi perusahaan pembiayaan nya tetapi masing-masing debitur masing-masing kebijakan ini juga kondisinya berbeda-beda waktu mereka melakukan permohonan kredit pertama kali.

Ada yang dp-nya 20% ada yang lebih dari situ jangka waktu ada yang 3 tahun ada yang 5 tahun pola pembiayaan nya juga ada yang (*suara tidak jelas*) ada yang eksekusi dari perbankan nya dan juga ada yang join Financing ini masing-masing punya kondisi yang berbeda-beda, tetapi secara garis besar pola restrukturisasi nya sudah disepakati bahwa itu memberikan keringanan dalam bentuk menggugurkan pembayaran sampai dengan 1 tahun apakah itu bunga

ataukah itu pokok bahkan juga diberikan kesempatan kalau memang menurut analisa daripada perusahaan pembiayaan ini memang pembiayaan yang besar bisa juga mereka memberikan keringanan karena ini masing-masing tentu punya perhitungannya di perusahaan pembiayaan.

Sampai saat ini ini bahkan sampai kami sampaikan bahwa kalau tadi di sebut kan masih ada depkolektor ya bekerja kami sudah koordinasikan dengan asosiasi kebetulan asosiasi di perusahaan pembiayaan (*suara tidak jelas*). itu kita sudah koordinasi terus setiap hari kita kontak dengan mereka dan mereka juga sudah menyatakan bahwa depkolektor yg sudah tidak jalan. Bahkan ada beberapa dari perusahaan pembiayaan ini ini karena depkolektor nya itu tetap harus terima pendapatan walaupun tidak kerja tetap mendapat penghasilan dari mereka.

Ada 4 hal sebenarnya kenapa depkolektor ini ini tetap bekerja, kalau kredit itu ini untuk Sharing saja ya Bapak Ibu jadi kalau si peminjam itu bisa ditemui barang jaminannya ada ini tidak perlu ada depkolektor artinya memang sih peminjam ini (*suara tidak jelas*) gratis sesuai dengan yang pertama kali sesuai dia meminjam.

Ada kondisi bahwa si peminjam tidak bisa dihubungi tetapi perusahaan pembiayaan tahu bahwa dia itu masih memegang barang jaminan ada lagi kondisi si peminjam nya ada tetapi barang jaminannya sudah enggak di dia, kondisi yang terakhir adalah bahwa si peminjam yang sudah tidak bisa dihubungi dan barang jaminan juga tidak ada di tempat umumnya yang nomor dua tiga empat inilah baru depkolektor tetapi dalam situasi saat ini mereka sudah komit mungkin nanti kalau ada informasi dari bapak mengetahui ada konstituen yang masih dikejar baik perusahaan depkolektor boleh kami dikasih tahu supaya kami juga bisa menghubungi perusahaan pembiayaan nya, yang lain yang terkait dengan kegiatan restrukturisasi yang sudah berjalan ini saat ini ada 183 perusahaan pembiayaan sampai hari ini kami monitor setiap hari sudah 138 perusahaan pembiayaan melaporkan kepada OJK bahwa mereka siap melakukan program restrukturisasi mereka sudah siap dengan (*suara tidak jelas*) mereka sudah siap dengan sarana infrastruktur termasuk sarana website untuk bisa dihubungi oleh peminjam sehingga tidak perlu datang ke kantor mereka.

Dari 138 perusahaan pembiayaan 99 tadi yang disampaikan sudah memiliki kebijakan Kemudian dari 138 perusahaan itu 79 sudah mengumumkan bahwa mereka siap untuk melakukan restrukturisasi kepada para debiturnya, dan dari 138 perusahaan tersebut sebanyak 14 perusahaan pembiayaan sudah menerima pengajuan restrukturisasi jumlah pengajuan restrukturisasi dari para nasabah yang memang terkena dampak covid19, Sampai 31 Maret jumlahnya 11.235, dari 11.235 permohonan ini sebanyak 10.256 debitur sudah mendapat konfirmasi restrukturisasi.

Jadi memang betul bapak ibu sosialisasinya perusahaan pembiayaan ini sekarang tinggal para peminjam datang untuk meminta dilakukan restrukturisasi dalam kesempatan yang baik ini juga mungkin kalau boleh mohon maaf Bapak Ibu ini ada permohonan kerja dari perusahaan perusahaan pembiayaan ya punya operasi yang besar jadi kita juga mengetahui bahwa di beberapa daerah itu Kepala Desa atau Kepala Wilayah mengumumkan sudah tidak boleh ada kegiatan penagihan sehingga mereka tidak bisa mengaktifkan kantor-kantor mereka yang ada di wilayah.

Kalau dimungkinkan kalau bapak ibu kebetulan mengetahui mohon supaya diberikan kesempatan karena mereka ingin mendekatkan diri dengan para peminjamnya kalau tadi disampaikan bahwa tidak semua juga bisa kalau bukan pendaftaran secara online, jadi mungkin kalau mereka bisa beroperasi meminjam bisa datang di kantornya, yang lain mungkin juga kami tambahkan pada kesempatan hari ini adalah memang menjadi perhatian adalah masyarakat yang penghasilannya terganggu karena dampak dari covid.

Yang banyak disampaikan adalah selain UMKM adalah pengemudi online transportasi online apakah ini sepeda motor ataupun bisa juga kendaraan bermotor. Jadi kami juga melakukan turun langsung untuk mengatasi hal ini karena seperti bapak ibu ketahui lh kamu juga mengetahui bahwa pengemudi pengemudi online ini tidak ada data spesifik yang menyampaikan pekerjaannya sebagai pengemudi online di perusahaan pembiayaan di mana mereka meminjam, sehingga perusahaan pembiayaan waktu kami menanyakan bagaimana data-datanya mereka tidak punya data akhirnya OJK memfasilitasi kita undang go-jek dan grab ini kita pertama kan kita sampaikan kita minta bantuan mereka untuk bisa mendata dari para mitranya khususnya menyangkut nomor polisi kendaraannya nomor (*suara tidak jelas*) data-data ini bisa digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk mencari sebenarnya masing-masing pengemudi ini menjadi nasabah perusahaan pembiayaan yang mana.

Karena di asosiasi itu mereka punya aplikasi si yang dipakai oleh seluruh perusahaan pembiayaan yang disebut aplikasi registrasi jadi dengan data-data yang utama tadi plat nomor mesin nomor rangka nomor polisi itu bisa diketahui nama peminjamnya dan meminjam dari perusahaan pembiayaan mana, kemudian langkah selanjutnya adalah bahwa data-data ini akan dikelompokkan untuk masing-masing perusahaan pembiayaan kemudian dievaluasi masing-masing statusnya bagaimana dan kita sudah mendapatkan kesepakatan untuk nanti kita bicarakan kembali dengan grab dan go-jek untuk mereka bisa membantu dalam sosialisasi kepada para mitranya.

Untuk ini asosiasi juga diminta untuk menandatangani perjanjian (*suara tidak jelas*) asosiasi memenuhi Untuk membantu karena ini bukan data-data keuangan tetapi asosiasi membantu mereka tandatangani (*suara tidak jelas*) dan sayangnya sampai hari ini ini datanya belum masuk ini yang kami terus mengejar hampir setiap hari supaya go-jek dan grab ini bisa segera mengirimkan data-data,

Untuk ilustrasi bapak-bapak gojek itu punya Mitra online seluruh Indonesia ini hampir satu setengah juta grab itu punya 2 juta jadi ini besar sekali kalau memang semua itu bersedia mengkoordinir untuk bisa kita lakukan restrukturisasi, tetapi bapak-ibu juga mesti (*suara tidak jelas*) bawa mungkin juga tidak semuanya yang menjadi peminjam bisa juga mereka ini menggunakan memakai kendaraan yang disediakan oleh keluarganya atau (*suara tidak jelas*)tu bisa terjadi tetapi kalau (*suara tidak jelas*) bisa segera diberikan perusahaan pembiayaan melalui asosiasi kita bisa segera tahu statusnya segera melakukan lobi.

Apakah yang lain diluar ini juga kemarin bapak ibu juga viral keluhan dari seorang driver transportasi taksi online yang menyatakan bahwa kendaraannya akan diambil begitu ya tetapi kita belum dapat kebenarannya Bagaimana di lapangan ternyata juga ada prakteknya bahwa kendaraan itu bukan merupakan milik dari pengemudi atau mitra jadi ada juga yang menyediakan penyewaan jadi

beberapa pengemudi ini ternyata menyewa dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di situ ada yang besar mungkin ada yang (*suara tidak jelas*).

Sehingga dalam hal ini sebenarnya yang perlu bank atau perusahaan pembiayaan adalah perusahaan penyewaan ini itu mesti juga kita himbau mereka data-datanya kita sudah lihat asosiasi perusahaan pembiayaan sudah berkoordinasi dengan seluruh anggotanya di perbankan pun juga sudah punya datanya, jadi itu yang kejadian di lapangan jadi memang tidak semuanya kejadian itu apa namanya memang bukan ada perusahaan pembiayaan atau tidak aktif bahkan di perusahaan persewaan itu yang kami juga diskusikan mereka juga mengalami masalah bahwa kendaraannya dibawa lari oleh mitranya perusahaan online ini jadi macam-macam kejadian di lapangan Kalau dipukul rata itu nanti seolah-olah wah ini kok tidak ada perhatian padahal di sana juga banyak juga yang mengambil manfaat di lapangan.

Jadi mungkin itu Pak tambahannya, dan terakhir mengenai sanksi sanksi ini yang paling sederhana tadi sudah disampaikan oleh (*suara tidak jelas*) bahwa mereka yang tidak melakukan restrukturisasi mereka harus membentuk pencadangan dan mereka ini pasti dalam pengawasan kita ujungnya Akan mereka rugi sendiri karena pemegang sahamnya kalau dia tidak melakukan cadangan dan penghasilannya juga tidak sedang baik konsekuensinya (*suara tidak jelas*)

Dengan dia melakukan restrukturisasi sebenarnya ini benefit untuk mereka untuk menjaga kelangsungan daripada perusahaan, saya rasa itu Pak yang dapat kami tambahkan lebih kurangnya kami mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira informasi dari masing-masing konstituen kami berkenan diinformasikan supaya kami bisa follow up perusahaan pembiayaan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ris.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Pimpinan mohon izin untuk mengundang Pak Husein untuk beberapa pertanyaan tadi, Mohon izin.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (HUSEIN):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Komisi XI.

Bapak Ibu Anggota Komisi XI.

Rekan-rekan Dewan Komisioner.

dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini.

Pertama-tama mungkin ingin saya sampaikan langsung aja tadi ada pertanyaan dari Pak Andreas terkait dengan Perpu yang di pasal 23 terutama untuk transaksi terhadap keterbukaan informasi mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia di pasar modal memang ada dua pendekatan termasuk di OJK di dalam pengawasan, yang (*suara tidak jelas*) yang yang ini terhadap (*suara*

tidak jelas) dalam hal Bank atau (*suara tidak jelas*) di perusahaan pembiayaan atau asuransi di pasar modal (*suara tidak jelas*).

Ini karena mereka mendapatkan izin usaha dari OJK karena itu mereka Sebagian ada yang menjadi emiten-emiten yang dalam hal ini di pasar modal menjadi perusahaan publik yang memang rezim nya adalah disklosur atau keterbukaan informasi, kami berkomitmen untuk mengeluarkan atau berkomitmen di dalam mengatur terutama di pasar modal adalah memberikan untuk disclosure tidaklah pengambilan keputusan untuk jual beli saham, ini yang disebut tadi symmetric information jangan sampai terjadi tidak simetris atau asimetris.

Tetapi hal ini akan berikan pada saat dalam situasi seperti sekarang Prudential supervision ini dimana misalnya contoh satu bank yang memang sedang di dalam pengawasan pengawas perbankan yang kebetulan dia emiten di dalam proses resolution atau penyehatan perbankan itu Ini ada irisannya dengan disklosur yang ada di pasar modal kami melihat kalau di dalam proses penyehatan perbankan ini Katakanlah satu bank sedang ditangani oleh ..Pak Heru dan kebetulan perusahaan publik atau emiten di Bursa Efek Ini akan ada kontraproduktif karena program penyehatan yang dilakukan oleh pengawas bank tentunya memang bukan untuk konsumsi publik Bahkan ini akan men-trigger adanya dan kalau ini terjadi ras akan berimbas kepada sistem ekskresi perbankan, inilah kita relaksasi atau kita masukkan ke dalam sehingga kita punya landasan Pak di dalam proses penyehatan (*suara tidak jelas*)khususnya seperti di perbankan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Harapan kami kalau misalnya program penyehatan yang dilakukan oleh pengawas perbankan itu menjadi lancar (*suara tidak jelas*) adalah pemegang saham publik akan menikmati karena banknya kemudian tetap bisa survive dan perusahaan publik atau emiten nya bisa tetap (*suara tidak jelas*) di pusat dan bisa melakukan aktivitas lebih baik lagi, kira-kira begitu mungkin pak Andre ya mungkin ini dilema di dalam 1 situasi dimana ada Rezim mengenai Prudential supervision dan ada rezim mengenai disclosure.

Pada saat ini beririsan kami tentunya lebih mementingkan keberlangsungan daripada emiten itu seperti tadi yang dijelaskan di dalam ketentuan untuk meningkatkan government di dalam melaksanakan dari Perpu tadi tentunya kami sekarang sedang membuat yang namanya prosedur internal ketentuan internal kita seperti tadi PDK ini peraturan dewan komisioner shop dan lain sebagainya kami sedang melakukan follow up atas itu untuk menjaga government daripada ada perlakuan terhadap terbuka informasi yang dikecualikan.

Yang berikutnya adalah terkait dengan Individual kalau boleh nanti akan kami sampaikan secara tertulis karena ini sudah menyangkut salah satu individual daripada ada (*suara tidak jelas*)di di pasar modal, yang Berikutnya tadi terkait mengenai (*suara tidak jelas*) sebenarnya Mungkin sedikit dikoreksi, 3 emiten sampai hari ini yang menyatakan komitmennya ada 61 emiten. itu terdiri dari 12 BUMN dan 49 non BUMN, dari 12 BUMN itu nilainya sekitar 10,15 triliun dan untuk yang non BUMN itu sekitar 7,23 triliun. dari yang punya komitmen di BUMN 12, 7 sudah melaksanakan buyback senilai 145 miliar dan untuk yang non BUMN dari 49 itu baru 27 yang sudah melakukan buyback senilai 581Miliar, jadi yang sudah dilakukan bebek dari 17, hampir 17,4 triliun baru dilaksanakan 726 miliar dan ini akan terus berlangsung itu laporan mengenai bebeknya dan tentunya nanti ini nyambung dengan pertanyaan tadi dari pasar Muji Kami lanjutkan tadi pertanyaan

dari Pak Jon erizal terkait dengan Perpu juga untuk pasal 5 insentif terhadap public flute emiten-emiten di atas 40% keatas.

Saat ini memang ada 163 emiten yang punya public Cloud 40% keatas Pak posisi Desember 2019, jadi perhitungan pajaknya tentunya mengikuti ketentuan perpajakan Untuk mendapatkan insentif pajak tahunan PPH nya itu posisi per Desember itu 163 Nanti bisa kita sampaikan secara tertulis dan ini, masih menggunakan ketentuan dimana pajaknya dari awalnya dari 25 menjadi 20% tetapi dengan Perpu itu dengan 25 sekarang untuk seluruh bidang usaha mendapatkan insentif menjadi 22% sampai tahun 2021. di dan Tahun 2022 menjadi 20%.

Untuk emiten yang punya 40% itu akan menjadi dapat lagi 3% diskonnya jadi dari 22% menjadi 19% sampai dengan posisi 2021 nanti Tahun 2022 menjadi 17% tetapi keputusan ini semua adalah domain nya daripada Dirjen Pajak bapak ibu ini kami hanya akan menjadi akan data mana yang punya public Float emiten-emiten itu di atas 40% keatas. Selibhnya ada beberapa persyaratan yang tentunya itu menjadi kewenangan daripada Dirjen pajak yang ini yang akan mungkin nanti kami akan sampaikan terkait tadi dengan pertanyaannya Apakah saat ini seperti disampaikan di dalam Perpu hal ini akan diatur didalam PP Pak ini Peraturan Pemerintah mungkin kami akan sampaikan pesannya untuk keadaan kita akan coba monitor terkait dengan penerbitan PP oleh pemerintah terkait dengan public cloud untuk emiten yang 40% insentif pajak.

Mungkin itu tadi pesan dari Nino terkait jual beli saham di pasar modal itu harus berkedaulatan mungkin ini juga kau kaitannya bahwa selama ini sudah ada kesepakatan pemerintah terkait juga dengan perjanjian-perjanjian baik multilateral terhadap industri industri yang bisa dimiliki oleh pihak asing beserta tugasnya masing-masing data punya kita akan kan (*suara tidak jelas*) dengan kesepakatan kesepakatan itu. mungkin itu saja yang bisa ditambahkan pak ketua. Terima kasih saya kembalikan ke pak ketua.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Mohon izin untuk satu lagi mengundang Pak Tirta bagaimana kita mengkomunikasikan melalui call center kita tadi ada pertanyaan dari Mbak Putri Kalau tidak salah silakan Pak Tirta.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (TIRTA SEGARA):

Terima kasih pimpinan.

Pimpinan Terima kasih pak ketua terima kasih.

Yang kami hormati bapak ketua Komisi XI.

Pimpinan Komisi XI dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih kami ingin sedikit menjelaskan mengenai layanan konsumen di OJK Kalau tidak salah tadi juga ada di tayangan dari presentasinya pak ketua Nomor 9 kalau tidak salah kami bisa sebutkan secara singkat datanya bahwa meskipun kami menerapkan work from home ini sudah beberapa minggu tetapi layanan ke konsumen tetap berjalan seperti biasa memang ada hambatan sedikit untuk layanan surat-menyurat dan work in customer tidak bisa dilayani saat ini karena kami semuanya work from home tetapi untuk layanan melalui telepon email

dan WhatsApp Ini masih jalan terus. sebagai gambaran saja layanan yang untuk telepon itu sehari-hari ada sekitar 400-500 telepon masuk ini di hari-hari normal tetapi pada saat pengumuman dari program untuk kebijakan restrukturisasi ini itu meningkat menjadi hampir 600 telepon masuk, itu masih bisa kami atasi kemudian email juga yang biasanya sekitar 250 itu meningkat menjadi hampir 700 tahun lebih 750.

Ini menjadi 3 kali lipat yang sangat mencolok ini adalah WhatsApp WhatsApp kami Nomor 0811 5715 7157 peningkatannya sampai 8 sampai 9 kali lipat yang biasanya sehari itu hanya 275-300 WhatsApp masuk setelah Pengumuman itu menjadi dua ribu empat ratus dua ribu lima ratus WhatsApp per 1 hari ini terus terang agen kami kewalahan dan bahkan mereka bekerja sampai tengah malam menjawab WhatsApp itu yang Jumlahnya ribuan setiap hari dengan agen yang jumlahnya terbatas.

Jadi kami mohon maaf kepada konsumen yang tidak bisa langsung dijawab pada saat itu juga karena memang peningkatannya WhatsApp ini bisa 7 sampai 8 kali. untuk layanan online ini yang sistem layanan informasi kredit atau biasanya dulu disebut BI check in Ini juga masih tetap buka tetapi dijalankan secara online. Satu hari untuk kantor pusat saja menyediakan fasilitas untuk layanan online ini sampai minimal 150 layanan sehingga kami masih melayani, permintaan untuk slip online ini juga meningkat pesat. Sehingga antrian Cukup panjang dan saat ini memang antrian untuk dapat layanan itu sudah sampai di awal-awal bulan Mei jadi konsumen agar bersabar juga harus antri agak panjang.

Sebagai tambahan info ada 3 pertanyaan yang paling utama baik itu melalui telepon maupun WhatsApp itu Yang pertama mengenai kebijakan stimulus, mereka perekonomian ini ini yang mengenai restrukturisasi pembiayaan Apakah hanya yang terdampak covid itu yang pertama.

Yang kedua itu komplain mengenai pengajuan restrukturisasi tetapi ditolak, ini sebetulnya bukan bisa luruskan ini sebetulnya bukan ditolak Karena pada hari di hari pertama Pengumuman itu disampaikan Banyak masyarakat langsung mendatangi Multifinance mendatangi bank KPR langsung minta direstrukturisasi Padahal mereka sendiri di kantor-kantor cabang ini memang belum sampai mendapatkan juklak dari kantor pusatnya jadi memang saat itu pertanyaan itu apakah semua konsumen bisa direstrukturisasi belum juga dijawab oleh agen-agen atau kantor-kantor nasabah yang ada di daerah. ini sekarang dengan adanya pengumuman sosialisasi oleh OJK dan juga oleh asosiasi yang cukup proaktif cukup gencar ini mudah-mudahan masyarakat sudah bisa semakin paham.

Mungkin itu saja pimpinan Bapak ketua terima kasih. ***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

kami kembalikan kepada Pak Dito sebagai Ketua Komisi XI.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wimboh Santoso ketua OJK yang telah memberikan pemaparan kepada Pak Heru Pak Kris Pak Husen dan Pak Tirta, yang telah memberikan pemaparan menjawab pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR RI ini, terima kasih kami yang sebesar-besarnya yaitu kepada tim dari sekretariat Komisi XI DPR RI kemudian tim dari kesekjenan kemudian juga yang sekarang sedang bekerja di Senayan, yang mendukung terlaksananya rapat kerja dari kemarin sampai hari ini.

Baik untuk selanjutnya hanya ada dua alternatif kita langsung masuk ke kesimpulan atau pendalaman kalau ada pendalaman pun hanya pertanyaan apa yang sudah disampaikan oleh pak wimbo pak Heru Pak Husein Pak Tris maupun Pak Tirta Tetapi hanya 3 menit karena jam 5 kita harus masuk ke kesimpulan, Bagaimana Apakah kita langsung ke kesimpulan atau ada pendalaman.

Tunggu kalau ada pendalaman begini supaya tertib sebentar coba di ini dulu saya kasih kesempatan perfeksi tetapi 3 menit begitu 3 menit kalau sudah lebih 3 menit langsung kita matikan kemudian sisanya dengan tertulis 3 menit 27 menit pas kita masuk kesimpulan silakan dari Fraksi PDIP Perjuangan Apakah ada? (rekaman tidak jelas)

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Terima kasih ketua dan kawan-kawan di Komisi XI.

Dan juga ketua OJK beserta jajarannya.

Syukur *alhamdulillah* Puji Tuhan, kita boleh bertemu pada sore hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun saya coba memperdalam beberapa pertanyaan menyambung jawaban dari Pak Husein tadi tentang buyback, apakah ada target setelah di buyback ada target prosentase yang harus dijaga oleh OJK, (rekaman tidak jelas) atau ini dilepaskan begitu saja. Kemudian terkait jawaban tentang emiten 40%(rekaman tidak jelas) motifnya apa dengan munculnya Aturan ini, pasal ini, pasal di mana 40% saham diperdagangkan mendapatkan PPH lebih rendah karena ini terjemahkan Ini sama juga mendapatkan kurang lebih 6% dari *cash flow*, *free cash flow* ini apakah juga diwajibkan sebagian dari padanya untuk membantu pencegahan covid 19 itu.

Kemudian poin kedua yang saya sampaikan adalah tadi kita bicara bahwa relaksasi ini berdampak pada cash management daripada perbankan maupun daripada nasabah baik itu ritel maupun korporasi, Kita tahu bahwa banyak juga masyarakat yang memiliki aset non Liquid nanti apakah ada 1 mekanisme yang memimpin kan mempermudah cast (rekaman tidak jelas) jadi yang kita jamin rumah tanah segala macam, untuk kemudian mendapat cash supaya bisa mendukung kegiatan usaha.

Ketiga ada dari tentang still over daripada krisis sistem kesehatan menjadi krisis finansial atau perekonomian, kita apa(rekaman tidak jelas) ada dari sektor ke sektor ke dalam industri yang ada atau sektor ke sektor di dalam supply chain produksi karena ini tentunya akan mempengaruhi karena kita perlu tahu supaya kita tahu kalau ini dalam ternyata covid ini bisa sampai Agustus Kita bisa melakukan 1 simulasi dampak perekonomian yang seperti apa sehingga kita bisa mengambil

langkah-langkah tertentu, yang terakhir saya melihat bahwa OJK ini adalah posisi yang sangat unik karena semua industri keuangan dibawah OJK sehingga memungkinkan bagi OJK itu merancang sesuatu untuk membuat semacam covid fund, untuk menghimpun dana membuat peralatan covid 19 karena respon kita ini cepat atau lambat respon cepat kita ini terhadap covid 19 ini mempengaruhi cepat atau lambat kita keluar dari ancaman krisis keuangan atau ekonomi.

Saya pikir itu saja dari saya.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, selanjutnya kami persilahkan Pak Misbakun langsung bicara 3 menit Kalau lebih dari 3 menit maaf harus saya potong silakan Pak.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih, saya terhadap apa yang disampaikan Pak ketua tentang perancangan terkait dengan proses penanggulangan yang di dalamnya itu pak ketua menyampaikan bahwa penanggulangan ini melalui proses restrukturisasi sehingga mempengaruhi perancangan, sementara saat ini PSAK 71 itu kan berat untuk perbankan PSAK 74 itu Insurance dan untuk sewa saham menggunakan 73. Menurut saya saatnya sekarang OJK bersama ikatan akuntan indonesia mengumkkan menunda pelaksanaan PSAK 71, 72, 73, dan 74 ini momentum terbaik karena apa kalau ini tidak dalam sebuah yang memadai maka saya yakin ini tidak akan berjalan.

Aturan-aturan yang akan berjalan yang ada itu kurang memadai kalau menurut saya kalau kemudian PSAK 71 nya masih tetap berlaku, mau tidak mau karena kasus ini kita harus melakukan penundaan kemudian saya ingin menyampaikan juga kepada pak ketua bahwa protokol aturan yang ada di OJK harus benar-benar dilaksanakan, saya saya mengingat kembali kepada OJK dan jajaran komisioner jangan sampai politik atau kebijakan apapun tanpa dibicarakan di rapat dewan komisioner OJK ini penting karena apa ini kenapa saya salah satu orang yang pada saat kasus Century itu terbongkar kita tahu bagaimana rapat-rapat itu di desain dan sebagainya.

Jadi tolong supaya tidak menjadi sebuah Presiden di masa depan karena Bapak harus ada sepenuhnya bahwa periode Bapak ini selesai tahun 2022 setelah 2022 Bapak pensiun atau terpilih kembali Itu kan Bapak harus bisa tenang menjalankan kalau mau pensiun pensiun kalau mau menjabat lagi menjabat lagi tetapi tidak kemudian dengan konsekuensi yang lain, Saya mengingatkan ini dalam rangka apa ini adalah krisis ini adalah (rekaman tidak jelas) dari paparan pemerintah kemarin cover by paparan OJK Hari ini saya melihat bahwa fishermen, itu kurang memadai menurut saya tapi saya ingin mengingatkan Tolong dijaga protokol aturan sehingga Bapak memutuskan sesuatu itu kolektif kolegial nya berjalan dengan baik terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Jadi kepada teman-teman yang ingin mengajukan pendalaman yang disiapkan stopwatch Selanjutnya kami persilahkan Fraksi Gerindra.

F-P. GERINDRA (IR. H. SOEPRİYANTO):

Izin ketua Saya sedikit 1 menit nanti Pak Elnino bisa lanjut, Terima kasih ketua jadi saya ingin menyampaikan mengingatkan bahwa PP nomor 1 tahun 2020 ini sudah berlaku di dalam pasal 29 itu ada beberapa pasal yang tidak berlaku ada beberapa pasal 12 undang-undang yang tidak berlaku, ada BI ada LPS tetapi saya tidak melihat pasal-pasal di OJK berarti undang-undang OJK ini tetap berlaku karena dipasang di mana di pasal 29 itu tidak ada undang-undang OJK tidak berlaku begitu ya, ini saya mengingatkan kemudian yang kedua di undang-undang pencegahan kewenangan sistem keuangan itu ada pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 hanya merubah masalah yang pasal 20 ayat 2 dan 3 itu masalah sistem kemudian yang berlaku di PP itu sistemik dan selain bank sistemik hanya itu saja jadi saya mengingatkan kepada OJK agar berhati-hati karena dalam Perpu ini tidak ada perubahan terhadap undang-undang OJK saya kira itu saja ketua terimakasih mungkin ada dilanjutkan sama Pak Kamarumad silakan.

F-P.GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si):

Pertama pak ketua, Terima kasih ketua pendalaman tadi yang disampaikan ketua OJK Apa pandangan ketua jika seandainya kita menunda atau menghentikan sementara waktu premi untuk industri perbankan dan industri jasa keuangan non bank karena mereka kan sedang mengalami kesulitan kalau itu ditunda Apakah itu akan mempengaruhi kinerja pengawasan atau kinerja OJK secara keseluruhan, itu perlu penjelasan lebih detail terakhir boleh tidak di update berapa juta nasabah dari 46 perusahaan pembiayaan yang khusus untuk roda dua supaya ini bisa kita berikan masukan kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup ya sekarang kami persilakan dari Fraksi Nasdem kalau ada tidak ada OK dari PKB. baik langsung saja ke PKB.

Silakan 3 menit ya.

Pak Fathan tidak ada sinyal ini baik kita ganti saja ya, Kemudian dari Demokrat Apakah ada, tidak ada.

F-PD (MARWAN CIK ASAN):

Pak Wimboh, Pak Husen dan Pak Riswinandi tadi saya sudah mendengarkan dengan seksama respon atas berbagai pertanyaan yang kami ajukan tadikan pada sesi tanya jawab saya minta supaya stimulus yang dibuat itu lebih tajam dan lebih dalam saya pada bagian jawaban yang diberikan itu tidak konkrit bagaimana terhadap usul saya supaya OJK merekomendasikan pembebasan cicilan bagaimana rekomendasi OJK terhadap pemerintah untuk mengurangi cicilan atau bunga(*suara tidak jelas*) selesai krisis ini hutang mereka belum tentu bisa langsung on bisa belum tentu bisa langsung bekerja Apa itu yang saya minta yang kedua saya juga belum mendengar program stimulus yang akan direkomendasikan oleh OJK ini di bidang pertanian Pak.

Di kampung saya itu Pak harga komoditas itu jatuh bebas sekarang Karet itu tinggal Rp4.000 kemudian yang mau beli juga tidak ada itu kenapa tidak dipikirkan masyarakat di sini kan petani nya bukan cuman UMKM saja pertanian, (*suara tidak jelas*) Ini Mayoritas penduduk kita masih petani Terima kasih Ibu kapoksi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam baik 1 menit 22 detik Terima kasih Pak Marwan selanjutnya PKS kalau ada dari PKS ada tidak ada oke lanjut dari PAN ada.

F-PAKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi sudah banyak yang dipaparkan tetapi saya ingin mengerucut kepada kewenangan yang diberikan pemerintah kepada OJK terkait dengan wabah 19 ini ini dalam menerima kewenangan baru di otoritas yang dapat memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan untuk melakukan penggabungan selaku pengambilalihan integrasi dan atau konferensi ini saya ingin tahu sejauh mana OJK telah mempersiapkan *human resources* nya dan sop yang handal supaya kewenangan ini disempurnakan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dan serta dapat dipertanggungjawabkan itu yang pertama.

Yang kedua pada Perpu nomor 1 tahun 2020 itu tidak disebutkan status dari pasal 1 ayat 25 undang-undang nomor 28 tahun 1995 tentang pasar modal yang terkait dengan prinsip keterbukaan wewenang OJK akan menyebutkan ada sebagian pertentangan dalam prinsip tersebut yaitu pengecualian bagi pihak tertentu dari Kewajiban melakukan prinsip keterbukaan yang betul-betul dirasakan dalam penjelasan an adalah sebagai emiten atau perusahaan publik yang pendaftaran telah menjadi efektif mengenai pasar modal.

OJK bagaimana cara Dapat uraian kondisi kondisi yang memenuhi syarat ketika prinsip keterbukaan dapat dikecualikan kemudian kita juga minta OJK tetap menjunjung tinggi fungsinya dalam perlindungan konsumen karena pelanggaran keterbukaan berpotensi menimbulkan asimetris information kemasyarakatan khususnya pemodal yang pada akhirnya dapat merugikan sehingga penggunaan wewenang ini harus dengan pertimbangan yang matang. Jadi mohon di pertimbangkan hal ini Bapak ketua OJK, terima kasih pimpinan *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Pas 2 menit luar biasa selanjutnya dari Pan kami persilahkan Pak Jon 3 menit.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):

Saya langsung saja ke pokok permasalahan yaitu tadi disampaikan oleh ibu kita sebelumnya Apakah OJK betul-betul sudah siap artinya menurut saya ada baiknya dibikin stimulasi kalau terjadi beberapa bank yang kolaps misalnya atau beberapa bank baru wewenang ini diambil menurut saya ini ya Resiko yang sangat besar karena beban nya nanti sepenuhnya ada di pundak OJK Jadi kalau ini diambil oleh OJK beban dan paling besar ada di OJK kalau kalau itu salah margin badan usaha atau bank pada kondisi normal saja sulitnya setengah mati apalagi kalau kondisi itu dipaksakan dipaksakan ini kondisi yang formal pasti kejadiannya kedepankan akan sulit untuk ditebak tidak bisa diprediksi karena kalau itu terpaksa sehingga nanti para pemegang saham itu akan melimpahkan kesalahan atas tindakan yang diambil oleh OJK oleh karena itu perlu stimulasi Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih 1 menit 5 detik dari PPP, tidak ada ada silakan 3 menit ya.

F-PPP (DRA. HJ. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung saja saya ingin tanyakan kepada kita semua (*suara tidak jelas*) termasuk nelayan termasuk petani Oleh karena itu saya berharap kepada OJK untuk benar-benar mendata mana yang menjadi dampak covid 19 karena tidak adil kalau memberikan apa namanya(*suara tidak jelas*).

Kemudian yang kedua saya tekankan bahwa sosialisasi itu sangat penting(*suara tidak jelas*) sekali lagi saya berharap lebih cepat lebih baik(*suara tidak jelas*).

KETUA RAPAT:

Baik kami kembalikan ke Pak apakah Bapak Wimboh akan memberikan jawaban dari pendalaman dari anggota Komisi XI DPR RI ataukah langsung dijawab secara tertulis Kami persilakan Bapak wimboh dulu silakan Pak.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Terima kasih pimpinan.

Menurut hemat kami banyak hal-hal yang tadi sudah kami catat dan juga ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan tentunya nanti akan kami verifikasi kita jawab secara tertulis karena tadi sebenarnya semuanya tentunya banyak masukan-masukan yang bagus sehingga bisa menjadi pedoman kami dalam nanti melakukan eksekusi berikutnya terutama agar data konkret ini bisa di mitigasi (*suara tidak jelas*) jadi menurut hemat kami akan kami jawab secara tertulis beberapa hal tadi terutama yang pertanyaan yang ketiga ini sehingga kami mengharapkan nanti bisa lebih jelas kalau tertulis karena waktunya sudah semakin mepet Bapak Pimpin.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

1 menit saya pakai stopwatch ya Pak silakan.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Wimboh nanti dijawab tertulis saja skenario mitigasi ini atau sekenario yang dijelaskan oleh (*suara tidak jelas*)tu Prediksinya bertahan untuk sekian berapa lama itu saja jadi karena ini kan sekarang Ibarat masih Marathon 20 persen perjalanan covid 19, nanti waktu yang akan datang akan lari Jadi kalau lari serangan covid 19 otomatis dampaknya juga luar biasa Jadi kita ingin tahu skenario yang dibuat OJK untuk bertahan berapa lama tentu nanti kita akan ada rapat lagi secara reguler itu saja pak ketua Pak Dito yang baik.

Terima kasih salam sehat untuk semuanya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ramson yang begitu ganteng, tidak sampai 1 menit 49 detik Baik Ibu dan Bapak sekalian kita sekarang masuk ke kesimpulan rapat kami persilakan sekretariat yang ada di Senayan untuk menyangkan kesimpulan kita pada siang hari ini.

Rancangan kesimpulan rapat kerjaKomisi XI DPR RI bersama ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Selasa 7 April tahun 2020.

Komisi XI DPR RI bersama dengan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati:

1. Otoritas Jasa Keuangan akan menyusun prosedur penggunaan cadangan pemulihan ekonomi berdasarkan assessment atas kebutuhan likuiditas dan solvabilitas industri jasa keuangan kepada komite stabilitas sistem keuangan dan melaporkan kepadaKomisi XI DPR RI secara berkala.

2. OJK akan melaksanakan assessment atas potensi resiko sektor jasa keuangan dan memonitor kondisi likuiditas setiap bank dan perusahaan pembiayaan dan terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit atau leasing.

3. OJK akan menyampaikan jawaban secara tertulis maksimal 7 hari kerja.

Baik, Kita sekarang kembali ke nomor satu dulu apakah bisa diterima ya silakan, Pak Ecky.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

(*suara tidak jelas*) Terkait dengan komitmen untuk senantiasa mencegah agar yang mencegah moral Hazard hampir semua komisioner menyatakan demikian dan ketua dan para komisioner nya tentu ini harus dihargai Bagaimana kemarin rapat kerja dengan Menteri Keuangan saya rasa poin yang Menteri Keuangan kemarin(*suara tidak jelas*) kita tuangkan juga pimpinan sebagai bentuk respon kita respek kita apresiasi kita kepada komitmen teman-teman dari OJK.

Yang kedua pimpinan tadi jelas bahwa semua mengatakan bahwa kita memberikan kelonggaran tetapi akan memberikan skema-skema yang dalam rangka menghadapi covid 19 ini tetap tapi mengedepankan sedapat mungkin potensi yang ada di dalam rumah PPSK itu. kan(*suara tidak jelas*) itu mungkin nanti perlu diungkapkan juga pimpinan(*suara tidak jelas*)

Yang terakhir adalah perlu ada terkait dengan komitmen untuk dengan nasabah terutama(*suara tidak jelas*) perlindungan nasabah nasabah kecil mulai dari online petani UMKM dan sebagainya, Mungkin itu pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan nomor satu saja dulu.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Betul ini terkait nomor 1 pak ketua, saya langsung saja ini penggunaan cadangan pemulihan ekonomi dari mana maksudnya, pak ketua, ini yang saya maksud menyusun undang-undang (*suara tidak jelas*) Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur prosedur penggunaan cadangan Pemulihan ekonomi, cadangan pemulihan ekonomi yang bagaimana maksudnya, kementerian keuangan ataukah perbankan itu sendiri atau bagaimana ini mohon(*suara tidak jelas*).

Dan diskusi kita dari kemarin belum sampai kesana sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Silakan pak Misbakun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak pak ketua saya hampir sama ini skema pencadangan ekonomi ini apa maksudnya terus kemudian kalau kemudian kita bicara pencadangan kita belum tahu aturan pencadangan yang dibuat oleh OJK karena itu apa dalam rangka menghadapi covid 19 ini makanya tadi saya ada usul PSAK 71, 72, 73, 74 itu ditunda pelaksanaannya dulu jadi sebelum kita tahu apa yang akan menjadi regulasi masuk dalam pokok mengenai pencadangan ini dalam rangka restructuring kemudian merger dan sebagainya kita kan belum tahu pak Jadi kalau menurut saya lebih baik tadi usulan Pak Ecky yang kemarin di mana semangat membangun tata kelola good governance transparansi itu dimasukkan di awal untuk menghargai semangat yang ada dari sahabat-sahabat kita ada rekan-rekan kita di OJK untuk bagaimana membangun governance dalam langkah memperkuat pengelolaan aturan dan kemudian kita mengantisipasi dampak krisis yang diakibatkan oleh krisis ini.

Jadi kalau bahasanya penggunaan cadangan krisis perekonomian ini kan kita belum tahu seperti apa.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ramson.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu point 1 baiknya didelete, karena OJK tidak bisa membuat keputusan tersendiri mengenai yang 150 trilyun itu mungkin maksudnya TA yang menyusun draftnya keputusan ini.

KETUA RAPAT:

Baik jadi nomor satu usulannya bagaimana tadi Pak.

F-G (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Kalau menurut saya begini Pak yang kemarin mengenai tata kelola governance transparansi yang berasal dari dalam rangka mengelola itu terhadap covid 19 itu kan kemarin ada itu itu kalimat itu bisa dipakai untuk OJK pak.

KETUA RAPAT:

Langsung saja redaksionalnya Pak.

F-G (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Komisi XI mendukung Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat kebijakan pada sektor industri jasa keuangan, dalam penanganan covid 19 yang transparan terbuka akuntabel dan mengedepankan tata kelola governance.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Kemarin sudah bagus Pak bukan menangani covid19 Pak tapi dalam rangka penanganan dampak covid 19 cara transparan kalau yang kemarin Pak secara dengan tata kelola yang baik transparansi dan akuntabilitas.

KETUA RAPAT:

Oke coba Sekretariat diperbaiki, perbaiki dulu sebentar ya satu-satu, Mana tadi tayang kan dulu sekretariat.

Sekretariat mana ini, Komisi XI DPR RI mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat kebijakan pada sektor jasa keuangan dalam penanganan covid 19. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat kebijakan, Industri jasa keuangan dalam penanganan covid 19, (*suara tidak jelas*).Coba Pak Ecky tadi.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Kalau OJK itu kan bukan penanganan covid 19, Kalau OJK itu dampak-dampak kalau kemarin kan Menteri Keuangan ada penanganan.

F-G (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Karena Kementerian Keuangan kan berkaitan dengan anggaran alokasi dan sebagainya, kalau OJK itu dampaknya pada sektor industri jasa keuangan.

KETUA RAPAT:

Bacain satu satu.

F-G (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Komisi XI DPR RI mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat kebijakan pada sektor industri jasa keuangan dalam mengatasi dampak covid 19 dampak ekonominya itu itu, dalam rangka dalamnya 1 itu yang dibawa, dampak ekonomi serta penyelamatan, kalau penyelamatan ekonomi janganlah penyelamatan ekonomi itu ruangnya pemerintah begitu Jadi di industri jasa keuangan ya kalau keseluruhan itu di pemerintah di KSSK sektor moneter nya makro prudensialnya Bank Indonesia industri jasa keuangan yg ada di OJK jadi kita segmented di industri jasa keuangan jangan ngomong perekonomian nasional lagi.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak ketua kalau diatas disebut industri keuangan dampaknya tidak usah disebut lagi Jadi kenapa OJK itu mengelola sektor industri keuangan jadi tentu dampaknya itu dampak dari covid 19, dampak sektor keuangan.

F-G (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Iya sudah ekonominya dihilangin.

KETUA RAPAT:

Iya saya baca ini sebentar, *Komisi XI DPR RI mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan pada sektor industri jasa keuangan dalam mengatasi dampak covid 19 serta penyelamatan sektor industri Jasa keuangan yang akan dilaporkan dan diproses secara reguler dengan Komisi XI DPR RI, Setuju.*

(RAPAT : SETUJU)

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Pimpinan mungkin setelah kata kebijakan karena kita juga dengar dari OJK dan jajarannya bahwa selain kebijakan coba kriteria-kriteria aturan main dan parameter yang akan digunakan untuk mengantisipasi apabila efek dari dampak covid 19 ini berkepanjangan. Tetapi aturan perubahan turunannya kemudian seperti protokol dan lain-lainnya begitu.

F-G (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

kalau menurut saya itu sudah masuk di kebijakan Pak, dan kita kan akan regular.

KETUA RAPAT:

Pak Misbakhun cukup kita kembalikan ke Pak Wimboh dulu Pak.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Terima kasih pimpinan untuk nomor 1 mungkin serta penyelamatan ini menurut hemat kami terlalu sempit ya karena bukan hanya penyelamatan bisa (*suara tidak jelas*). Tidak perlu ada penyelamatan tetapi yang lebih luas adalah menjaga stabilitas sektor keuangan ini lebih umum di dalamnya itu ada protokol penyelamatan kalau memang perlu ada penyelamatan stabilitas sektor keuangan mungkin itu yang lebih umum pimpinan, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Oke baik Jadi kalimatnya, *Komisi XI DPR RI mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan pada sektor industri jasa keuangan dalam menghadapi dampak covid 19 serta menjaga stabilitas sektor keuangan yang akan dilaporkan dan dibahas secara reguler dengan Komisi XI* begitu Pak.

(RAPAT : SETUJU)

(*suara tidak jelas*)

Sebentar-sebentar dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ketua komisioner dewan OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparansi dan akuntabilitas, bisa di terima.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Saya ingin menambahkan dalam pencegahan dan penanganan (*suara tidak jelas*) dalam rangka pencegahan dan penanganan ini sudah benar pak ketua, dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan agar memiliki protokol sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Lanjut yang nomor 2 ketua.

KETUA RAPAT:

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bahwa dewan komisioner OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, lanjutannya dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan agar memiliki protokol syarat dan ketentuan (*suara tidak jelas*).

Tunggu Pak Agung sekretariat belum diketik, dirapikan sekretariat sekalian bagaimana? Ulang.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Saya ulangi, dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, masih nomor 2, (*suara tidak jelas*) dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan agar mengikuti protokol syarat, dan ketentuan yang belum

ditetapkan sebelum keuangan itu digunakan. sebelumnya ketentuan yang ditetapkan, dirubah ke depan, ketentuan yang ditetapkan, Sebelum kewenangan tersebut ditetapkan.

KETUA RAPAT:

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 ketua dewan komisioner OJK akan menerapkan prinsip tata kelola baik transparansi dan akuntabilitas dengan pencegahan dan penanganan, agar memiliki protokol syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebelum kewenangan tersebut digunakan. ada masukan lagi yang lain.

F- P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si.):

Pimpinan ini ada dua substansinya, substansi nya Maksud saya itu mengenai syarat dan ketentuan protokol yang dimaksud Pak Agung itu mungkin yang di ketiganya bukan nomor itu karena yang nomor dua itu adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengenai protokol dan syarat ketentuan yang dimaksud Pagu bisa di nomor 3 ketua.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :

Pak ketua, saya Sependapat dengan Pak El Nino saya juga sependapat dengan Pak Agung Rai soal perlunya protokol dan prosedur itu ditetapkan di awal sebelum kita mengambil kebijakan supaya ibarat kita mau bermain sepakbola bahwa aturan 2 kali 45 menit itu sudah kita tentukan diawal bukan ditengah pertandingan sehingga banyak-banyak penyesuaian dan kemudian akhirnya govenrnancenya menjadi lemah yang merupakan prinsip yang hendak kita pegang. Menurut saya poin 1 benar poin 2 sudah benar yang menjadi poin ketiga tadi itu poin yang disampaikan Pak Agung Rai itu menjadi poin ketiga supaya substansinya menjadi jelas kemudian tersegmentasi, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke jadi kita bicara poin 2 dulu dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka satu Ketua dewan komisioner OJK akan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik akuntabilitas itu dulu ya.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Pak ketua ada sedikit saja ini soal kata redaksi ini pak ketua boleh iya nomor 2. Ayah kalau meja itu enak kali ya tapi, Iya nomor 2, itu kan nomor satu itu kita mendukung upaya nah Nomor duanya dalam melaksanakan upaya bukan kewenangan begitu karena di nomor 1 kita tidak memberikan kewenangan tetapi upaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 ketua dewan kewenangan OJK agar menerapkan.

Jadi upaya karena di atasnya sesuai di atas itu upaya bukan kewenangan kemudian digantikan dengan agar dewan kewenangan agar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akan itu diganti agar begitu ketua terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 ketua dewan komisioner OJK agar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparansi dan akuntabilitas baik kami kembalikan ke Pak Wimboh.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Terima kasih pimpinan.

Mungkin ini dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparan dan akuntabilitas ini kan seluruh jajaran OJK bukan hanya ketuanya saja pimpinan menurut hemat kami ini mestinya disebutnya adalah OJK bukan ketua komisioner OJK.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ketua itu sebaiknya bukan transparansi ya kalau tata kelola yang baik transparan dan akuntabel.

F-P.... (.....):

Itu kalimat tata kelola yang baik itu adalah satu frase disebut prinsip good governance (*suara tidak jelas*)

KETUA RAPAT:

Oke jadi dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 Otoritas Jasa Keuangan atau menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparan dan akuntabel akuntabilitas. Iya Ibu Vera silakan.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Saya sepakat dengan kesimpulan yang pertama namun yang kedua ini kan bukan hanya di dalam menangani covid 19 secara reguler OJK sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola (*suara tidak jelas*) buka jadi kalau di dalam praktek OJK sudah melakukan hal tersebut bukan untuk COVID 19 saja yang normal mereka sudah melakukan hal ini ini di dalam undang-undang OJK sudah tertuang sehingga kita berdandan dalam menulis point nomor 2 ini begitu menurut saya.

KETUA RAPAT:

Maksudnya poin 2 penjelasan dari poin 1 Pak nomor 2 Pak.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Kami Setuju pak cuma tadi tata kelola yang baik transparan dan accountable.

KETUA RAPAT:

Oke Setuju semua ya. Ya

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 3, Komisi XI DPR RI meminta kepada OJK agar dalam (*suara tidak jelas*) yang ditetapkan sebelum kewenangan (*suara tidak jelas*) Pak Agung Rai bagaimana.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Pak ketua di sini agar nya 2 kali (*suara tidak jelas*) agar yang di atas dihapus, meminta OJK agar penanganan krisis agar memiliki protokol syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebelum keuangan.

F-PG (H. MUHKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Kalau menurut saya begini Pak Komisi XI meminta OJK mencegah penanganan krisis keuangan agar memiliki protokol di mana ketentuan (*suara tidak jelas*) sebelum kewenangan tersebut digunakan, Jadi begini pak meminta OJK dalam rangka melakukan tindakan pencegahan, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan agar memiliki protokol syarat ketentuan yang ditetapkan sebelum kewenangan tersebut digunakan sudah.

KETUA RAPAT:

Sebentar saya baca dulu sebentar, (*suara tidak jelas*) Komisi XI DPR RI meminta OJK dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan Agar memiliki protokol syarat ketentuan yang ditetapkan sebelum kewenangan meskipun digunakan Betul Pak sudah cocok.

(*suara tidak jelas*)

Komisi XI DPR RI meminta OJK Dalam rangka tindakan pencegahan dan penanganan sistem keuangan agar memiliki protokol syarat (*suara tidak jelas*)

Pak Wimboh bagaimana Pak wimboh.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Kami tidak keberatan Pak.

KETUA RAPAT:

7 semua setuju?

Sudah diketok Bu apa tambahannya.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Untuk memperjelas makna Komisi XI DPR RI meminta OJK dalam dalam rangka melakukan tindakan pencegahan dan penanganan keuangan dikasih koma disitu agar memiliki syarat terlebih dahulu sebelum kewenangan tersebut

digunakan. jadi memperjelas bahwa harus ada protokol sebelum digunakan jadi pakai kata tambahan terlebih dahulu.

KETUA RAPAT:

Langsung 4.

F-PG (H. MUHKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Cukup tiga saja dulu Ketua, stop dulu sekretariat.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Mungkin boleh tambahan satu karena kita melihat kan ini antara pemahaman masyarakat dengan stimulus yang diterapkan pemerintah masih belum sinkron pemahaman atau informasinya tidak sampai ke bawah jadi perlu ada 1 bahwa untuk memastikan sosialisasi relaksasi stimulus keuangan ini dapat diterima dalam dapat diterima di masyarakat secara apa ya secara utuh begitu.

KETUA RAPAT:

Apa kalimatnya kira-kira apa Sihar.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Sebentar ya saya sudah tulis, Komisi XI DPR RI meminta OJK melakukan sosialisasi relaksasi stimulus keuangan kepada masyarakat agar pemahaman pemerintah dan masyarakat sama.

F-PG (H. MUHKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH):

Saya mohon izin Pak ketua terhadap usulnya Pak Sihar ini, kalau masalah stimulus belum dirumuskan secara konkrit bentuknya seperti apa Saya khawatir Nanti kita sosialisasi itu menjadi *backfire* kita mensosialisasi contoh sederhana ketika presiden mengumumkan adanya stimulus tentang penanggulangan langsung diserbu OJK padahal peraturan pelaksanaannya belum jalan bentuk stimulus seperti apa dan sebagainya Kalau menurut saya kita melakukan sosialisasi tetapi programnya belum jelas sementara tadi ada perdebatan misalnya kita langsung membayar cicilannya kita lakukan ini restructuring pencadangan dan sebagainya kalau konsep dan rumusan mengenai stimulus.

Bagaimana terhadap cicilan masyarakat dan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah itu belum benar-benar konsepnya matang bisa implementasi di lapangan sosialisasi itu akan memperburuk situasi dan keadaan yang ada dan akan menjadi simpang siur di masyarakat menjadi lebih banyak Mohon maaf Pak Sihar.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Kalau boleh saya ini setuju juga boleh juga begitu cuma sisi lainnya sama juga kalau masyarakat tidak diberikan pemahaman masyarakat akan menelan

bulat-bulat juga apa yang dibaca ditonton di TV yang disampaikan oleh presiden atau para menteri dalam hal ini mungkin bukan sosialisasi programnya karena mungkin program itu tadi yang seperti pak bilang belum tuntas tetapi sosialisasi tentang apa ya.

KETUA RAPAT:

Sebentar pak Misbakhun pak Sihar Saya kira masalah sosialisasi ini sudah sangat dipahami oleh OJK jadi tidak usah tersurat tapi sudah tersirat setuju.

F-P.... (.....):

Kalau saya lebih baik begini Pak tanpa ada masih di kesimpulan tetapi kita mengingatkan kepada OJK untuk memperbaiki komunikasi publik nya itu saja supaya tidak terjadi simpang siur dan sebagainya program yang belum matang dan sebagainya jangan segera dipublikasikan itu kalau menurut saya dikoordinasikan dengan baik Baru diomongkan atau publik.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira untuk soal sosialisasi komunikasi tidak perlu masukan dalam kesimpulan saya kira cukup ini saja sudah di drop nomor 4, sudah 5.30 cukup ya, silakan Pak wimboh.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Itu yang baris pertama Komisi XI DPR RI bersama dengan ketua dewan komisioner itu mungkin ketuanya dihilangkan Pak dewan komisioner OJK.

KETUA RAPAT:

Iya itu betul maksudnya begitu Pak sekretariat saya, cukup ya, coba sekretariat dari atas dulu.

Komisi XI DPR RI, bersama dengan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati:

1. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan pada sektor industri jasa keuangan dalam mengatasi dampak covid 19 serta menjaga stabilitas sektor keuangan yang akan dilaporkan dan dibahas secara reguler dengan Komisi XI DPR RI.
2. Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 Otoritas Jasa Keuangan agar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparan dan akuntabel.
3. Komisi XI DPR RI meminta OJK dalam rangka melakukan tindakan pencegahan dan penanganan sistem keuangan agar memiliki protokol syarat dan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum kewenangan tersebut digunakan.
4. Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan jawaban tertulis paling lambat 7 hari kerja.

Setuju Pak Wimboh.

(RAPAT SETUJU)

Baik (*suara tidak jelas*) dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini Selasa 7 April 2020 Sebelum saya tutup kami persilakan pak ketua dewan OJK untuk memberikan closing statement.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Sekali lagi bapak ketua wakil ketua dan seluruh anggota Komisi XI kami seluruh anggota dewan komisioner dan seluruh jajaran OJK mengucapkan banyak terima kasih atas saran atas bimbingan dan dukungan Komisi XI dalam berbagai langkah kita dalam rangka menjalankan tugas terutama mencegah adanya krisis keuangan di Indonesia ini terutama yang diakibatkan adanya covid 19 ini tentunya kami tanpa dukungan bapak bapak dan ibu semua rasanya sulit kami bisa melangkah dengan lebih confidence atau ke depan yang ini dan kami barangkali mohon Kami tetap dipimpin dalam pelaksanaannya nanti dan apabila ada hal-hal yang diperlukan kami sempurnakan kami dengan senang hati kita melakukan diskusi lagi dan kami untuk melaksanakan tadi ada kesimpulan yang sudah disampaikan dalam rapat ini.

Demikian, terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Atas nama pimpinan dan Komisi XI DPR RI Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan dewan komisioner OJK dan seluruh jajarannya kemudian juga kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI tugas sekretariat yang mendukung terlaksananya rapat rapat pada hari ini yang bertugas di Senayan juga kepada media dan karena ini terbuka mengucapkan terima kasih yang telah mengikuti acara rapat kerja pada sore hari ini dan dengan mengucapkan Hamdalah *alhamdulillahirobbilalamin* rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.50 WIB)

Jakarta, 7 Februari 2020

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono

NIP. 196205211982031001

